

**KOLABORASI LINTAS SEKTOR MELALUI PROGRAM SANITASI
TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) UNTUK Mendukung
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs)
(Studi Pada Penerapan Program *Open Defecation Free (ODF)*
Di Kabupaten Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh

Winda Agustin
1616041052



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Kolaborasi Lintas Sektor Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi Pada Penerapan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Pringsewu

Oleh :

Winda Agustin

Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan program Open Defecation Free (ODF) sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) terkait masalah sanitasi. Terbentuknya kerja sama lintas sektoral merupakan komponen yang kompleks dalam pelaksanaan program ODF sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program ODF untuk mencapai SDGs di Kabupaten Pringsewu melalui 3 dimensi, yaitu dimensi vertikal, dimensi horizontal, dan dimensi kemitraan. Tujuan lainnya adalah menganalisis pencapaian hasil program ODF berdasarkan indikator SDGs. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral dalam melaksanakan program ODF berjalan dengan baik, melalui komunikasi dan komitmen yang menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan program. Kolaborasi lintas sektor merupakan konsep kolaborasi antar sektor yang tidak terikat oleh hubungan hirarki secara langsung, tetapi saling melengkapi dari sumber daya dan kompetensi yang berbeda dan berperan untuk saling mengisi, bukan sebagai substitusi dalam melaksanakan program ODF. Kolaborasi lintas sektor dalam program ODF telah membawa hasil pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Namun, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan keberlanjutan program, mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, oleh karena itu, kemunduran akan keberlanjutan program dapat menyebabkan masyarakat kembali ke perilaku awal yaitu buang air besar sembarangan yang menjadi salah satu sumber utama permasalahan sanitasi.

Kata kunci: *Kolaborasi, SDGs, Program ODF*

ABSTRACT

Cross-Sector Collaboration through the Community-Based Total Sanitation Program in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs) Study of the Implementation of the Open Defecation Free (ODF) Program in Pringsewu District

By:

Winda Agustin

The Pringsewu District Government has implemented the Open Defecation Free (ODF) programme as a follow-up to the National Policy on Community-Based Total Sanitation (STBM) related to sanitation issues. The formation of cross-sectoral cooperation is a complex component in the implementation of the ODF programme as well as a form of support for the Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this study is to examine the collaboration in the implementation of the ODF programme to achieve SDGs in Pringsewu District through 3 dimensions, namely the vertical dimension, horizontal dimension, and partnership dimension. Another objective is to analyse the achievement of ODF program results based on SDGs indicators. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The results of this study show that cross-sectoral collaboration in implementing the ODF programme is going well, through communication and commitment which are the main keys in achieving programme success. Cross-sectoral collaboration is the concept of collaboration between sectors that are not bound by direct hierarchical relationships, but complement each other from different resources and competencies and act to complement each other, not as substitutes in implementing the ODF programme. Cross-sector collaboration in the ODF programme has brought development results that are in line with the principles of the Sustainable Development Goals (SDGs). However, the Pringsewu District Government has experienced setbacks in program sustainability due to several factors, therefore, setbacks in program sustainability can cause the community to return to their original behaviour of open defecation, which is one of the main sources of sanitation problems.

Keywords: Collaboration, SDGs, ODF Program

**KOLABORASI LINTAS SEKTOR MELALUI PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT (STBM) UNTUK Mendukung *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* (SGDs)
(Studi Pada Penerapan Program *Open Defecation Free* (ODF)
Di Kabupaten Pringsewu)**

Oleh

Winda Agustin

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KOLABORASI LINTAS SEKTOR MELALUI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) UNTUK Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Pada Penerapan Program *Open Defecation Free* (ODF) Di Kabupaten Pringsewu)**

Nama mahasiswa : **Winda Agustin**

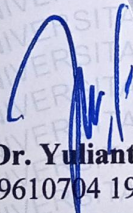
Nomor Pokok Mahasiswa : **1616041052**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

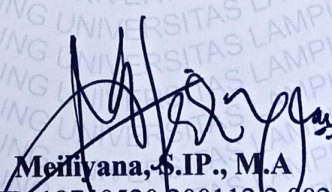


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yulianto, M.S
NIP. 19610704 198803 1 005


Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si
NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Administrasi Negara


Meiliyana, S.IP., M.A
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S

Sekretaris : Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si

Anggota : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, Rabu 24 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Winda Agustin
NPM 1616041052

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Winda Agustin, lahir pada tanggal 5 Agustus 1997 di Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Mat Ansori dan Ibu Harsiati. Memiliki dua orang adik laki-laki dan satu orang adik perempuan. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Sukaratu lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah di SMP Negeri 1 Pagelaran yang diselesaikan pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah yaitu di SMA Negeri 1 Pagelaran dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan).

Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis menjadi mahasiswa baru. Penulis tergabung dalam beberapa organisasi kampus baik itu di tingkat Fakultas maupun Universitas di antaranya adalah Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) bidang Dana Usaha (DANUS) tahun 2016-2017 Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) tahun 2017 hingga 2018, Setelah itu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Lampung sebagai Korf Muda BEM XII (KMB XII) dan dilanjutkan dengan staff ahli pada Kementerian Aksi dan Propaganda (Kemen Akspro) tahun 2016 sampai dengan 2018. Serta tahun 2018 sampai 2020 pernah menjadi bagian dari GenBI (Generasi Baru Indonesia) KPW Lampung sebagai penerima beasiswa dari Bank Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019.

Pada periode Januari-Februari 2019 penulis melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa SukaMarga, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya periode Juli-Agustus 2019 penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Lampung. Berkat petunjuk dan rahmat dari Allah SWT, do'a dan dukungan dari kedua orang tua serta keluarga yang terkasih, dalam menjalankan

aktivitas pendidikan di Universitas Lampung menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Kerjasama Lintas Sektor Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Studi Pada Penerapan Program *Open Defecation Free* (ODF) Di Kabupaten Pringsewu”

MOTTO

“ ALLAH tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”

(QS. Al Baqarah [2]: 286)

Pada dasarnya takdir ALLAH itu selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya

(Umar Bin Khattab)

“percayalah bahwa belajar ikhlas adalah jalan menuju kedewasaan”

“jika jalan hidup tidak sesuai dengan harapan, maka ikhlas adalah sumber dari kebahagiaan”

“tak apa jika hujan turun setiap hari, tapi percayalah bahwa ada pelangi yang menunggu di penghujung hari”

(Winda Agustin)

PERSEMBAHAN



Yang paling utama dari segalanya maha suci **Allah SWT**, Tuhan semesta alam.

Sembah sujud serta syukur kepada **Allah SWT** yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta menunjukkan setiap jalan yang aku lewati. Atas karunia dan kehendak serta kemudahan yang **Engkau** berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Sholawat & salam tak lupa selalu tercurah kepada **Rasulullah Muhammad SAW**

Teriring rasa syukur atas limpahan nikmat-**Nya** tak terhingga, kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku

Ayahanda **Mat Ansori** dan Ibunda **Harsiati** tercinta. Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga atas setiap do'a, semua kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Adik-adikku

Aulia, Amar, dan Yazan yang selalu memberikan semangat dan keceriaan baru ditengah perjuangan hingga terselesaikannya tugas akhir ini

Keluarga besarku

Terima kasih atas segala dukungan dan do'a yang selalu menyertaiku dan mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan memberikan dukungan

Sahabat-sahabat yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.

Untuk "seseorang" yang sedang jauh di jarak tapi dekat di relung hati, percayalah aku disini menantimu dalam do'a dan diamku. Semoga keyakinan dan takdir **Allah SWT** terwujud, insyaaAllah kita bisa bersama atas ridho dan izin **Allah SWT**.

Para Pendidik dan Civitas Akademika Yang Ku-Hormati

Almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kerjasama Lintas Sektor Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) (Studi Pada Penerapan Program Open Defecation Free (ODF) Di Kabupaten Pringsewu”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan atas dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orangtuaku ayah dan ibu, Terima kasih atas semua do'a, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang yang tak terhingga yang selalu memberikan motivasi, pengorbanan, didikan, dan usahamu, penulis dapat menyelesaikan studi sehingga bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara serta memenuhi harapanmu. Tiada kata-kata indah yang mampu mewakili ungkapan terima kasih dan syukur atas pengorbanan ayah dan ibu. Hanya riuhan doa yang selalu aku titipkan kepada-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya *aamiin*.

2. Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktu yang telah bapak berikan. Terimakasih banyak, semoga keikhlasan bapak dalam mendidik saya selama ini mendapatkan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT.
3. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing Kedua penulis, terimakasih banyak atas segala keikhlasan, ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan semoga terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
4. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan ilmu, masukan, dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A selaku dosen Pembimbing akademik, terimakasih atas dukungan, bimbingan, motivasi dan nasehat yang diberikan selama proses penyusunan skripsi sampai akhir, semoga ibu selalu diberi kemudahan dan kelancaran di semua urusan.
6. Bapak Syamsul Ma'arif, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing kedua saya terdahulu, terimakasih banyak atas waktu yang sudah bapak luangkan untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan tak lupa memberikan semangat motivasi, semoga segala sesuatu yang bapak lakukan diberikan kemudahan dan kelancaran dan semoga terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
7. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
8. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah memberikan dorongan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada saya selama proses perkuliahan, semoga

dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan saya kedepannya. Serta terima kasih juga atas perhatian yang bapak dan ibu berikan kepada penulis.

10. Mba Novita Sri Wulan, Bapak Juhari, dan Mas Hendro selaku staf jurusan Administrasi Negara, yang banyak membantu dalam hal kelancaran administratif. Terimakasih atas kesabaran dan ketersediaannya selama ini untuk kelancaran skripsi hingga akhir.
11. Ibu Erawaty, Ibu Seva, Bapak Hari, Bapak Tri, Mba Maulida, Mba Dita, Bapak Sardi, Bapak Alkhusari, dan Bapak, Legiyanto sebagai informan penelitian penulis yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan penulis. Terima kasih atas ketersediaannya serta keramahannya dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teruntuk adik-adikku. Aulia Chandara Kinanti, Qusay Amar Mustaufa, dan Yazan Amir Sulton. Terima kasih atas dukungan, semangat, perhatian yang selalu diberikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya juga meridhai setiap langkah yang akan kalian tempuh *aamiin*.
13. Kakak-adik sepupu. Abang Wandu, Abang Iyal, Kaka Meri, Kaka, Iin, Kak Unah, Kak Yesi, Ilham dan dan kepada semua keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan semoga Allah membalas setiap kebaikan selama ini *aamiin*.
14. Keponakan ku. Enjel, Farisa, Candani, zio, Anadia, dan yang lainnya. Terima kasih telah menjadi sarana untuk belajar mengendalikan amarah, menguji diri mampu sesabar apa, belajar untuk mampu menempatkan diri dalam situasi. Harapan serta do'a terbaik selalu ibung lambungkan ke langit di penghujung malam. Terima kasih sudah berbagi keceriaan.
15. Teruntuk keluarga besar dari ayah Mat Ansori dan ibu Aliyah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan juga kebaikan-Nya kepada kita semua *aamiin*.
16. Teruntuk teman-temanku tersayang Siti Komariah, Yana Fitri Yana, Mia Ayu Asari, Meilani Syarifa, Marisa Tri Junita, Okta Vianti, dan mba Opiks

terimakasih sudah banyak berproses, bersama, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis, selalu membantu penulis dalam proses bimbingan.

17. Teruntuk teman-teman yang sama-sama sedang berjuang diakhir Siti, Mei, Mia, Yusuf, Dede, David, Andre, Meilia dan sodik, ayo semangat berjuang bersama sampai akhir.
18. Teruntuk teman-teman kuliahku kuliahku Merah Squad, Winda Agustin, Nur Ina Sholeha, Maharani Karin, Azri Nurul Fatonah, Wice Yolanda, Niko Kresna, Sofyan, Erik Leonar, Syafe'i, dan Dimas Billi. Terima kasih atas waktu, kebersamaan, dukungan, kebaikan, perhatian, canda tawa, dan banyak hal yang kita lewati. Bersama kalian merupakan hal yang kusyukuri dan kenangan yang indah bias dipertemukan oleh kalian. Kebersamaan kita merupakan kenangan indahku semasa kuliah dan selamanya.
19. Sahabat seperjuangan ALASKA (Angkatan Delapan Belas Kader Administrasi Negara). Terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama kurang lebih empat tahun ini
20. Teruntuk Vivi, Mayda, Ema, Tumara, teman satu kosan sofi, terimakasih atas pengalamannya, kebersamaannya. Semoga Allah meridhai perjumpaan kita *aamin*
21. Teruntuk semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan.
22. Teruntuk diriku, terimakasih untuk selalu bersabar, dan mau melangkah sampai dititik ini tanpa pernah berfikir untuk berhenti atau pun lari, terimakasih sudah mau belajar ikhlas dan berjuang bersama, ingat bahwa di setiap perjuangan akan selalu ada kebahagiaan.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Rabu 16 Mei 2023

Penulis

Winda Agustin

Daftar isi halaman	
Daftar isi.....	ii
Daftar tabel.....	iii
Daftar gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu	13
2.2 Tinjauan Tentang Administrasi Pembangunan	15
2.2.1 Partisipasi Dalam Pembangunan.....	15
2.2.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan	17
2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	18
2.3 Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan	19
2.4 Tinjauan Tentang Inovasi Organisasi	23
2.5 Tinjauan Tentang Kolaborasi.....	25
2.5.1 Kolaborasi dalam Persepektif Teori Organisasi	27
2.5.2 Model Kolaborasi.....	28
2.5.3 Prinsip-prinsip Kolaborasi	33
2.6 Tinjauan Tentang STBM	38
2.7 Tinjauan Tentang ODF	41
2.8 Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian	46
3.2 Fokus Penelitian.....	47

3.3 Lokasi Penelitian.....	49
3.4 Informan Penelitian.....	49
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data Dan Triangulasi.....	51
3.7 Teknis Analisis Data.....	55
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu.....	60
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu.....	60
4.1.2 Kondisi Geografis.....	61
4.1.3 Visi Dan Misi Kabupaten Pringsewu.....	62
4.1.4 Kondisi Demografi.....	63
4.1.5 Kondisi Kesehatan.....	65
4.1.6 Kondisi Ekonomi.....	66
4.2 Gambaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	67
4.2.1 Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	67
4.2.2 Komponen STBM.....	68
4.2.3 <i>Open Defecation Free (ODF)</i>	71
4.3 Hasil Penelitian.....	72
4.3.1 Model Kolaborasi Weber, Lovrich, dan Garaffenev.....	72
1. Dimensi Vertikal.....	73
2. Dimensi Horizontal.....	76
3. Dimensi Kemitraan (<i>Partnership Linkage</i>).....	82
4.3.2 pembiayaan.....	88
4.3.3 Hasil Pencapaian Program.....	92
1. Hasil Pencapaian Realisasi Program.....	92
2. Perubahan Perilaku Kelompok Sasaran.....	99
3. Keberlanjutan Program.....	106
4.4 Pembahasan.....	109
4.4.1 Model kolaborasi Weber, Lovrich, dan Garaffenev.....	109
1 Dimensi Vertikal.....	111

2. Dimensi Horizontal.....	114
3. Dimensi Kemitraan (<i>partnership Linkage</i>).....	116
4.4.2 Hasil Pencapaian Program.....	119
1. Hasil Pencapaian Realisasi Program.....	120
2. Perubahan Perilaku Kelompok Sasaran	123
3. Keberlanjutan Program	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
5.1 Kesimpulan.....	127
5.2 Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi KLB Diare di Indonesia	4
Tabel 3.1 Data Informan	50
Tabel 3.2 Daftar Observasi Yang Berkaitan Dengan Penelitian	52
Tabel 3.3. Daftar Dokumentasi Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Pringsewu 2020	64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Di Anut	65
Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehayan Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	66
Table 4.4 Pembagian Peran Hubungan Kolaborasi Dalam Kerjasama.....	75
Tabel 4.5 Jumlah penerima manfaat pembangunan sanitasi komunal perkecamatan tahun 2011-2018.....	95
Tabel 4.6 Indikator Tujuan 6 SDGs yaitu Air dan Sanitasi dalam penilaian keberhasila program	96
Tabel 4.7 Data Laporan progres/ kemajuan akses sanitasi di Kabupaten Pringsewu	100
Tabel 4.8 Data Jumlah Kepala Keluarga Yang Tidak Memiliki Jamban sehat Per- UPT Puskesmas.....	100
Tabel 4.9 Data progress Akses Sanitasi Kabupaten Pringsewu	105
Tabel 4.10 Data jumlah penanganan monev sanitasi berkelanjutan	107
Tabel 4.11 Data Pembangunan Sanitasi SPALD-T/Tahun	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kejadian diare di Kabupaten Pringsewu.....	4
Gambar 2.1 Model Kolaborasi Weber, Loverich, dan Graffney.....	33
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir	45
Gambar 3.1 Model Triangulasi Sumber.....	55
Gambar 3.2 Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model).....	58
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Pringsewu	61
Gambar 4.2 Komponen Keterkaitan STBM	68
Gambar: 4.3 Bagan Pembagian Tim STBM	78
Gambar: 4.4 Bagan Alur Mekasime Kerja Program	82
Gambar: 4.5 Pembukuan Pembiayaan Sanitasi Dalam Bentuk Pinjaman	91
Gambar 4.6 Jumlah Kasus Diare Ditangani Kabuaten Pringsewu.....	93
Gambar 4.7 Data Akses Sanitasi Kabupaten Pringsewu Dari Tahun 2012 Sampai Dengan 2017	104
Gambar 4.8 Relasi berdasarkan Dimensi Vertikal dalam Hubungan Atas-Bawah..	112
Gambar 4.9 Alur Koordinasi dan Komunikasi yang digunakan dalam Kolaborasi atau kerjasama.....	118

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi setiap masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk kewajiban untuk menjaga masyarakatnya agar tidak tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan, khususnya dalam penanggulangan wabah penyakit sehingga, peran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakatnya dapat tercapai.

Tertuang dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu disebutkan bahwa (1) setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan memepertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, (2) berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perorangan upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dalam kesehatan. Salah satunya yaitu masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan.

Menurut Achmadi (dalam Elsi et al., 2012) Penyakit berbasis lingkungan merupakan masalah penyakit yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan dimana masyarakat tinggal dan beraktivitas dalam angka waktu tertentu. Dewasa ini, masalah kesehatan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan

bukan hanya menjadi permasalahan yang biasa, tetapi sudah mulai diperhatikan sebab kasus masalah kesehatan lingkungan juga terjadi diberbagai negara dan menjadi sorotan bagi dunia kesehatan. Negara Indonesia juga merupakan negara yang dimana kasus penyakit masalah kesehatan lingkungan sangat tinggi. Purnama (dalam Mahawati et al., 2021) menyebutkan bahwa Penyakit berbasis lingkungan sendiri merupakan suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi suatu organ tubuh manusia yang diakibatkan dari interaksi manusia dengan segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan masalah penyakit.

Penyakit berbasis lingkungan diantaranya meliputi: Demam Berdarah Malaria Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Diare TB Paru, Penyakit Kulit, Leptospirosis, Cacingan dan Filariasis. ISPA dan Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang selalu masuk dalam 10 besar penyakit yang tersebar hampir seluruh puskesmas di Indonesia (Mahawati et al. 2021). Bahkan dalam pengelolaan sanitasi lingkungan yang buruk berdampak pada masalah pertumbuhan pada anak-anak contohnya yaitu penyakit stunting.

Kebersihan lingkungan merupakan keadaan bebas dari kotoran termaksud debu sampah dan bau didalamnya. Di Indonesia sendiri masalah kebersihan lingkungan selalu menadi perdebatan serta permasalahan yang selalu berkembang. Kasus-kasus yang muncul dari masalah kebersihan lingkungan pun setiap tahunnya terus terjadi menjaga kesehatan lingkungan merupakan hal yang penting untuk dijalankan sebab lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya masalah Kesehatan.

Sumber yang menjadi penyebab masalah kesehatan berbasis lingkungan yaitu terlelak pada pegelolaan sanitasi lingkungan yang buruk bebab sanitasi menjadi sumber utama karena berkaitan langsung dengan aktifitas dan kesehatan masyarakat. Rendahnya akan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga merupakan suatu masalah sebab masyarakat sebagai pelaku utama penyebab timbulnya penyakit berbasis lingkungan. Menurut laporan *Join Monitoring Program* (JMP) (Wibowo et al. 2022) Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2015 diperkirakan bahwa terdapat 2,5 milyar penduduk didunia tidak memiliki akses terhadap jamban sehat dan 1 milyar

penduduk dunia melakukan suatu praktik buang air besar sembarangan. Di Indonesia sebanyak 12,9% penduduknya tidak memiliki akses jamban dan masih melakukan buang air besar sembarangan di sungai, laut ataupun di permukaan tanah.

Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk atau rumah tangga yang sudah menggunakan jamban sehat sebesar 82,6% sedangkan penduduk yang masih melakukan buang air besar sembarangan sebanyak 12,9%. Untuk proporsi cara penanganan tinja balita di rumah tangga tahun 2018 baik untuk perdesaan maupun perkotaan, dibuang sembarangan sebesar 33,5%, ditanam di dalam tanah 3,7% sedangkan menggunakan jamban dan di buang di jamban sebesar 37,8% dan 20,1%

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) atau *Open Defecation* yaitu merupakan tindakan/perilaku membuang kotoran/tinja atau limbah manusia ketempat yang terbuka menyebabkan terkontaminasinya sebuah lingkungan baik itu air, tanah maupun udara. Masalah pembuangan tinja secara sembarangan seharusnya mendapatkan perhatian khusus karena dapat mendatangkan banyak masalah di dunia kesehatan, sebagai tempat terbentuknya segala macam penyakit seperti Diare, Typhus, Disentri, Muntaber Cacingan dan gatal-gatal.

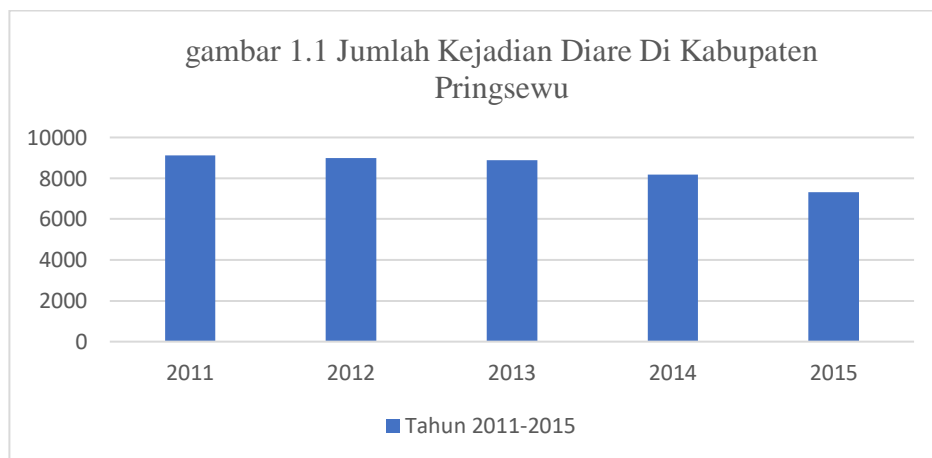
Sektor sanitasi merupakan salah satu sektor terpenting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, karena sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan masyarakat sendiri. Sanitasi adalah salah satu masalah yang di tandai dengan angka tingginya morbiditas dan mortalitas penyakit berbasis lingkungan. Bisa dilihat dari jumlah angka kejadian diare dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 yang terus terjadi naik turun dari tahun sebelumnya yaitu 62,93%. Salah satu aktor resiko yang sering terjadi yaitu masih adanya akses sanitasi yang buruk menyebabkan banyak masyarakat terkontaminasi bakteri E.coli dalam air yang menandakan adanya kontaminasi yang berasal dari tinja manusia (Saputra et al. 2021).

Tabel 1 Rekapitulasi KLB diare di Indonesia dari tahun 2010-2018

Tahun	Jumlah provinsi	Jumlah kejadian	Kasus	Kematian	CFR (%)
2010	11	33	4.204	73	1,74
2011	15	19	3.003	12	0,40
2012	17	34	1.625	25	1,54
2013	6	8	633	7	1,11
2014	5	6	2.549	29	1,14
2015	13	21	1.213	30	2,47
2016	3	3	198	6	3,03
2017	12	21	1.725	34	1,97
2018	8	10	756	36	4,76

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI 2019

Berdasarkan dari data keterangan pada tabel 1 terlihat bahwa masalah kesehatan berbasis lingkungan yang terjadi di Indonesia dalam hal ini adalah kasus diare dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami fase naik turun. Seperti yang bisa dilihat pada rekapitulasi KLB diare pada tahun 2017 jumlah masyarakat di Indonesia yang terserang penyakit diare sebanyak 1.725 kasus yang tersebar di 12 provinsi lebih banyak dari pada tahun 2018 yaitu sebanyak 765 kasus yang tersebar hanya di 10 provinsi saja, tetapi dalam kasus kematian akibat terserang penyakit diare di tahun 2018 kasus kematian lebih tinggi dua angka dari pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah kematian 34 jiwa.



Sumber: Ditjen P2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu 2018

Begitu pula dengan kasus diare yang terjadi di Kabupaten Pringsewu pada gambar 1.1, dimana dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kasus diare yang disebabkan oleh masalah kesehatan berbasis lingkungan yang terletak pada pengelolaan sanitasi

yang buruk serta rendahnya pemahaman masyarakat, yang menyebabkan kasus diare tidak kunjung turun. Tingginya angka kasus diare akibat pengelolaan sanitasi lingkungan yang buruk, yaitu dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang masih sering dilakukan masyarakat menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah, maka untuk menanggulangi masalah kesehatan berbasis lingkungan khususnya masalah sanitasi lingkungan, pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab atas kesehatan warga masyarakatnya, melalui pengembangan dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikeluarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 825/MENKES/SK/IX/2008 yang menjadikan program STBM sebagai pedoman program nasional yang menargetkan bahwa tidak akan ada lagi masyarakat Indonesia yang melakukan praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) serta menjadi sasaran utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan 2012).

Program STBM merupakan suatu program pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, terdapat indikator *outcome* dan indikator *output* yang dihasilkan dari program STBM yaitu indikator *outcome*: menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku masyarakat sedangkan indikator *output* yang dihasilkan yaitu : a) setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air sembarang tempat (ODF), b) setiap rumah tangga telah menetapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, c) setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, rumah sakit, kantor rumah makan puskesmas terminal, pasar) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan) sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar, d) setiap rumah tangga dapat mengelola limbahnya dengan benar, e) setiap rumah tangga dapat mengelola sampah dengan benar.

Pemerintah Pusat dalam hal ini memberikan kewajiban dan wewenang kepada seluruh daerah untuk memenuhi dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten, bahwa sanitasi menjadi urusan Pemerintah Kabupaten (lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38, Tahun 2007 di Bidang Kesehatan). Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Sanitasi Total Bebas Masyarakat, pemerintah kabupaten dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dan mengatasi sanitasi yang sesuai dengan permasalahan masing-masing daerah. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melakukan penerapan pada program berbasis sanitasi lingkungan adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat, karena untuk menyukseskan suatu program perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri selaku penggerak ataupun kelompok sasaran program.

Melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu Tujuan keenam air bersih dan sanitasi di bidang lingkungan dengan menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi layak berkelanjutan, serta adanya agenda nasional yaitu 100% akses universal air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPDJM) Tahun 2015-2019. Pemerintah Provinsi Lampung yang merupakan salah satu provinsi menargetkan di tahun 2019 seluruh kabupaten meraih 100% dalam hal universal akses air dan sanitasi. Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan program sanitasinya terus melakukan peningkatan target yaitu di tahun 2015 mencapai 50,11%, di tahun 2016 mencapai 62,24%, di tahun 2017 direncanakan dapat mencapai target sebesar 79,07%, kemudian di tahun 2018 ditargetkan mencapai 96,49%, serta di tahun 2019 dengan hasil 100% (Palupi 2019).

Namun di Tahun 2014 untuk menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak semua kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung berhasil melakukan pemisuan terhadap program sanitasi tersebut dari 15 kabupaten hanya 11 kabupaten/kota yang berhasil. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang termasuk dalam kabupaten/kota yang tidak berhasil dalam mengelola sanitasi. Untuk mendukung target Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menuju sanitasi 100% akses sanitasi layak, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menargetkan 100% ODF di tahun 2017 yang dimuat dalam program kebijakan STBM sebab, penduduk di Kabupaten Pringsewu tahun 2014 yang sudah menggunakan jamban sehat baru mencapai 65%.

Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapatkan dukungan dari organisasi nirlaba *Stichting Nederlandse Vrijwilligers* (SNV) melakukan kolaborasi dalam bentuk pendampingan yang berpusat di Kecamatan Pagelaran hingga pada tahun 2016 telah dicanangkan deklarasi untuk memperbaiki permasalahan sanitasi lingkungan di Kabupaten Pringsewu dengan menyukseskan kebijakan STBM yaitu *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sebagai program pertama di Kecamatan Pagelaran sekaligus menurunkan kasus diare yang merupakan indikator dari STBM.

Dari 131 total Desa/Kelurahan di Kabupaten Pringsewu baru 15 desa yang sudah dinyatakan *ODF Verified*, guna untuk mendukung tercapainya program ODF tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu meningkatkan implementasi pada program STBM dalam hal ini adalah pilar pertama yaitu ODF, mengeluarkan sebuah peraturan tentang percepatan Akses Universal Kabupaten Pringsewu di tahun 2017 dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor. 37 Tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pringsewu yaitu berisi tentang strategi yang digunakan dalam upaya percepatan universal dengan cara merubah pola fikir yaitu dari program menjadi gerakan sehingga dikeluarkannya kebijakan tentang Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu (Gebrak) ODF.

Open Defecation Free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan (BABS) merupakan program pertama yang terdapat dalam kebijakan dalam STBM. Tujuan adanya ODF sendiri adalah dapat meminimalisirkan atau menghilangkan kebiasaan masyarakat yang buang air besar sembarangan dan menjamin kebersihan, kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas sanitasi, dengan harapan angka penyakit berbasis lingkungan seperti diare dapat berkurang terutama yang berada di pedesa.

Pelaksanaan program ODF yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor : B/378/KPTS/D.02/2017 tentang Gerakan rakyat Kabupaten Pringsewu Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017 yang di perkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati pringsewu No : B/433/KPTS/D.02/2017 tentang satuan tugas pelaksanaan Gebrak Open Defecation Free/ Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017 yang berisikan susunan satuan tugas pelaksanaan Gebrak ODF terdiri dari semua sektor unsur pemerintah daerah, kecamatan pekon/kelurahan dan organisasi masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Terbentuknya Satgas Gebrak ODF atau Satuan Tugas Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu yang dibentuk berdasarkan SK Bupati Pringsewu Nomor: B/ 433/KPTS/D.02/2017 diketuai oleh Wakil Bupati Pringsewu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu sebagai wakil I dan APDESI Kabupaten Pringsewu sebagai wakil ketua II serta Sekban Bappeda Pringsewu.

Selain itu juga Satgas Gebrak ODF juga memiliki anggota yang tersebar di sembilan (9) kecamatan Kabupaten Pringsewu. Setiap wilayah kecamatan memiliki penanggung jawab masing-masing kecamatan dalam penerapan program ODF diantaranya: Inspektur sebagai koordinator wilayah kecamatan Pringsewu, Dinas Kesehatan sebagai koordinator wilayah kecamatan Gadingrejo, Dinas PP Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan KB sebagi koordinator wilayah kecamatan Ambarawa, Dinas Lingkungan sebagai koordinator wilayah kecamatan Pardasuka, Dinas Perhubungan sebagai koordinator wilayah kecamatan Banyumas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai koordinator wilayah kecamatan Pagelaran Utara, Badan Perencanaa dan Pembangunan Daerah sebagai koordinator

wilayah kecamatan Sukoharjo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai koordinator wilayah kecamatan Adiluwih seta Badan Penggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator wilayah kecamatan Pagelaran. Dalam pengimplementasiannya program Gebrak ODF ini juga turut melibatkan banyaknya pihak baik dari Kepolisian, TNI, sejumlah OPD, Ulama dan juga tokoh agama serta masyarakat Pringsewu.

Keberhasilan Kabupaten Pringsewu dalam melakukan implementasi pada daerahnya dalam beberapa tahun menjadi sebuah prestasi yang luar biasa. Kabupaten Pringsewu sendiri merupakan kabupaten pertama di Pulau Sumatra sebagai penyandang kabupaten ODF dalam mengelola sanitasi lingkungan yang merupakan hasil dari kolaborasi dengan semua pihak. Sebab masalah sanitasi saat ini sudah menjadi urusan bersama, tidak lagi menjadi tugas dan tanggungjawab dari satu dinas saja tetapi sudah meluas ke semua kalangan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Tidak hanya itu saja kesuksesan yang dituai Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyukseskan program ODF juga dijadikan acuan bagi pemerintah daerah lain untuk Studi banding tentang bagaimana mengelola sanitasi dalam hal ini program ODF dalam waktu singkat dapat sukses.

Penerapan program ODF di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari adanya kolaborasi yang dilakukan semua unsur lapisan masyarakat. Program ODF sendiri dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang lahir menjadi konsep inovasi pemerintah yang menjadikan pemerintah lebih peka dan efektif dalam bekerja serta memecahkan berbagai permasalahan dimasyarakat. Disisi lain kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu media pemerintah dalam menyukseskan suatu program karena kolaborasi lintas sektor tidak hanya dilakukan oleh dinas perseorangan saja melainkan berasal kumpulan dari dua, tiga atau lebih aparat pemerintah daerah di dalamnya. Kolaborasi lintas sektor dalam Program ODF ini juga mendukung adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang membawa keuntungan pada bidang lingkungan.

Pemerintahan sebagai aktor dari pembangunan memerlukan cara yang dinamis yakni melalui administrasi pembangunan pemerintah dalam mendesain strategi kebijakan secara tepat melalui orientasi perubahan-perubahan yang tetap memperhatikan dimensi ruang. Dimensi ruang merupakan segi perencanaan pembangunan yang memahami bahwa satu daerah berbeda dengan daerah lainnya dari karakteristik kelembagaan, sumberdaya manusia maupun dari segi potensi ekonomi, sehingga dalam pembangunan dimasa depan dapat mengembangkan potensi serta memecahkan suatu permasalahan daerah melalui sebuah inovasi.

Kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu cara yang tepat dalam memecahkan suatu permasalahan pembangunan yang semakin kompleks juga dapat bersinergi dengan sektor lain untuk tetap memadukan pengembangan potensi serta memecahkan berbagai permasalahan di masyarakat. Pemerintah menyadari bahwa di setiap sektor tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Menurut Ameli and Kayes menjelaskan bahwa menciptakan kolaborasi yang efektif tidaklah sederhana, perlu proses saling mengenal saling *sharing* kompetensi dan penggabungan perbedaan antar organisasi yang saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Sutisari et al. 2013). Menurut WHO Kolaborasi lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Kolaborasi tidak hanya dalam proposal pengesahan, tetapi juga ikut serta mendefinisikan masalah, prioritas kebutuhan, pengumpulan, dan interpretasi informasi serta mengevaluasi

Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dari sektor yang berbeda dan dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien dibanding sektor kesehatan yang bertindak sendiri. Sebuah daerah dapat dikatakan berhasil dalam mengurus wilayahnya jika mampu memenuhi kepentingan masyarakat dan menangani berbagai macam permasalahan yang timbul dari masyarakat.

Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya juga mengalami banyak kendala, disinilah masyarakat dan pihak swasta dapat berperan membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberdayakan masyarakat untuk membantu pembangunan daerah yang lebih maju. Menurut Adisasmita (dalam Ahmad, 2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kolaborasi Lintas Sektor Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi pada penerapan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pringsewu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Kolaborasi lintas sektor yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menerapkan Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pringsewu?
- b. Sejauh manakah keberhasilan kolaborasi lintas sektor melalui Program *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pringsewu dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan Pilar *Open Defecation Free* (ODF) di Kabupaten Pringsewu.

- b. Menilai pencapaian hasil yang ditunjukkan dari kolaborasi lintas sektor dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di Kabupaten Pringsewu.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan informasi untuk melakukan kajian/penelitian lebih lanjut tentang kolaborasi lintas sektor ataupun berkaitan dengan masalah lain.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan, informasi serta menjadi panutan kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bagaimana pentingnya kolaborasi untuk memecahkan suatu permasalahan di masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian. Melalui penelitian terdahulu penulis mampu mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun penelitian yang dicantumkan tidak memiliki kesamaan lokasi dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar acuan bagi peneliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sutisari et al. 2013), dengan judul “Kerjasama Antar Sektor Dalam Program Pertanian Padi Organik untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen)”. Hasil dari penelitian kolaborasi antar sektor dalam program pertanian padi organik di Kabupaten Sragen khususnya di Desa Sukorejo berjalan dengan baik bahkan berkembang begitu pesat sebab dalam pengelolaannya dilakukan dengan menggabungkan sektor-sektor yang ada dengan saling bertukar informasi, memahami cara kerja, struktur organisasi dan budaya organisasi sehingga setiap sektor dapat berkontribusi secara aktif sesuai dengan peran yang dimiliki.

Pada tahapan pembangunan berkelanjutan kolaborasi yang dilakukan sudah berhasil memberikan pengaruh bagi kelestarian lahan pertanian, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat petani, dan semua itu tercermin sebagai pemenuhan indikator-indikator yang berasal dari pembangunan berkelanjutan yaitu pilar

lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial sehingga dapat dikatakan berhasil dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinarmata et al (2021) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanung Karang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2019)”. Partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan belum dilakukan secara maksimal, ditemukan berbagai faktor yang menghambat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bersumber dari masyarakat saja namun juga dari pihak penyelenggara pemerintah.

Pentingnya kolaborasi antara pihak pemerintah yang memberikan arahan dan edukasi kepada masyarakat agar dapat menghasilkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebijakan. Dengan begitu keberhasilan program KOTAKU dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya capaian target tujuan nasional serta tujuan 6 dan tujuan 11 pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati seluruh negara didunia.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Mubarak 2022). Penelitian ini berjudul “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Bidang Kesehatan Pencegahan Stunting di Desa Ternate Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini yang dapat disimpulkan adalah bahwa dalam penerapan implementasi *sustainable development goal* (SDGs) dalam pencegahan stunting di Desa Ternate berhasil dapat dikatakan efektif atas pengimplentasian SDGs yang di lihat dari empat aspek yaitu: dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan tidak dinilai berdasarkan indikator *sustaiunable development goals* (SDGs).

2.2 Tinjauan Tentang Administrasi Pembangunan

Menurut Siagian, Administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan serta kehidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka menapai tujuan akhir. Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan bukan merupakan upaya nasional saja, artinya penyelenggara kegiatan pembangunan tidak hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dengan seluruh jajarannya tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan dalam kegiatan pembangunan di suatu negara. Administrasi pembangunan sebagai *agent of change* yang bersifat dinamis dan inovatif dalam upaya mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik melalui kebijaksanaan dan program-program pembangunan terutama pada negara yang sedang berkembang.

Administrasi pembangunan sangat penting dalam keterlibatan dalam pengerahkan sumberdaya dan pengalokasian untuk kegiatan pembangunan, namun ditengah fungsi tersebut terdapat aspek yang sangat penting dalam administrasi pembangunan yaitu aspek dimensi ruang (*spatial dimension of development administration*). Kartasmita menjelaskan bahwa dimensi ruang menjadi sangat penting artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan daerah menjadi lebih penting dalam rangka pembangunan nasional karena memahami bahwa satu daerah berbeda dengan daerah lainnya baik secara karakteristik sumberdaya manusia, potensi ekonomi maupun kelembagaan masyarakat (dalam Sutisari et al., 2013)

2.2.1 Partisipasi Dalam Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang *kontinue* dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Negara-negara yang sedang berkembang usaha pembangunan pada umumnya hanya dilakukan peranan oleh pemerintah saja yang aktif dengan usaha secara terencana.

Pembangunan yang meliputi dari segala segi aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya baru akan berhasil jika dalam pengambilan keputusan pembangunan juga melibatkan partisipasi dari masyarakat, tidak hanya dari pengambilan kebijakan tertinggi, kepemimpinan perencanaan dan pelaksanaan operasional saja tetapi juga mengikut sertakan semua golongan kecil di masyarakat. Administrasi pembangunan tidak hanya kemampuan untuk merencanakan strategi pembangunan yang baik kemudian diperinci dalam kegiatan-kegiatan nyata yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga hendaknya dapat menimbulkan respon dan kolaborasi dari seluruh rakyat dalam proses pembangunan tersebut. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kegiatan masyarakat luas sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan dalam proses pembangunan disini ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi pembangunan yaitu:

1. Terlibat dan ikut serta masyarakat dengan mekanisme proses politik turut menentukan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam masyarakat demokratis maka arah dan tujuan pembangunan hendaknya menerminkan kepentingan masyarakat. Cermin dari kepentingan masyarakat ini dilakukan melalui partisipasi rakyat dalam membantu mengambil keputusan politik maupun pengembangan perumusan kebijakan pembangunan melalui suara.
2. Pemerintah perlu memberikan pengarahannya mengenai tujuan dan cara mencapai tujuan pembangunan terutama meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan atau merencanakan tujuan pembangunan dengan baik. Dalam partisipasi pembangunan perlu dikembangkan kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan hal ini disebabkan karena proses pembangunan seringkali memerlukan proses pembaharuan orientasi nilai-nilai sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan perencanaan yang telah ditentukan dalam proses politik tergantung sistem

dan tata arah penyelenggaraan pemerintah yang berlaku dalam suatu negara. Adakalanya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih bersifat mobilisasi daripada mengambil partisipasi.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana program-program ini dalam suatu tingkatan tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana menyangkut kesejahteraan mereka dan dapat langsung merasakan hasil dari program yang mereka jalankan sendiri.

2.2.2 Peran Pemerintah Dalam Pembangunan

Pembangunan didefinisikan sebagai upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa negara dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan. Proses pembangunan memang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, meskipun demikian pemerintah lebih memainkan peranan yang lebih dominan dalam proses pembangunan nasional, menurut Siagian dalam Lisyarningsih (2014: 70) dalam rangka pembangunan nasional pemerintah memiliki peranan sebagai berikut:

1. Inovasi

Inovasi merupakan salah satu produk dari kreatifitas berupa temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting cara berfikir baru dengan demikian dalam pembangunan pemerintah harus memainkan peranan sebagai inovator artinya harus menjadi sumber inspirasi dari hal-hal baru yang telah disebutkan diatas. Terdapat tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam melakukan inovasi yaitu, 1) menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan melalui perubahan sistem kerja yang tepat, sederhana (tidak berbelit-belit), transparan, akuntabel, dan sebagainya. 2) inovasi yang bersifat konseptual, dengan menjadikan pemerintah

sebagai sumber ide-ide baru. 3) inovasi sistem prosedur, metode kerja yang mengarah pada “*problem solving*” dan “*action Oriented*”, artinya pemerintah harus bersedia meneliti dan mendiagnosa mengapa permasalahan timbul untuk kemudian dari jalan keluar dengan menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah sehingga terapi yang digunakan tidak hanya mengobati gejala yang timbul tetapi juga akan menghilangkan faktor penyebab sampai keakar masalahnya.

2. Stabilisator

Salah satu ciri negara berkembang adalah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri maupun datang dari luar negeri demikian juga dibidang ekonomi pemerintah memiliki peranan sebagai stabilisator yaitu mengusahakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat, terjadi inflasi, tingginya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat yang rendah dan lainnya di bidang ekonomi. Sementara itu tujuan pembangunan adalah perubahan sehingga pemerintah harus meminimalisir gejolak sosial atas terjadinya perubahan pembangunan. Biasanya di negara berkembang mentalitas masyarakatnya masih bersifat tradisional dan sulit menerima perubahan, disinilah peran pemerintah sebagai stabilisator sosial budaya.

2.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan menghendaki adanya kebijakan dan program pembangunan. Perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai tujuan kebijakan maupun program harus dilakukan oleh badan-badan pemerintahan. Berbagai pelaksanaan program dan mencapai sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga. Seringkali hambatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan usaha dan program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi. Hal ini lebih-lebih lagi dengan meningkatnya macam program yang bersifat antar lembaga. Misalnya pada program mengenai pengendalian lingkungan program keluarga berencana

program peningkatan produksi pertanian dalam hal ini menyangkut unsur-unsur pertanian atau pekerjaan umum perdagangan pertanian dan lain sebagainya). Hal yang tidak kurang pentingnya adalah masalah komunikasi dan koordinasi pelaksanaan berbagai program di dalam suatu sektor atau antar sektor/ lintas sektor terutama yang memperoleh prioritas dan melibatkan berbagai departemen/ lembaga tersebut.

2.3 Tinjauan Tentang Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Suryo (dalam Wicaksono, 2016) menjelaskan bahwa Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) sebagai salah satu paradigma dari pembangunan yang memiliki fokus utama yaitu mewujudkan keseimbangan pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu kepentingan pembangunan dalam jangka pendek harus lebih diseimbangkan dengan kepentingan jangka panjang, kepentingan sosial dan lingkungan harus ditempatkan pada posisi yang setara dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan sosial masyarakat harus lebih diselaraskan dengan kepentingan individu.

Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang jika tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan (Suparmoko 2020). Diperlukan pengembangan terus menerus nilai pembangunan berkelanjutan yang sama sekali baru dan berbeda dengan yang ada pada pembangunan konvensional.

Pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia dapat mendorong terciptanya nilai-nilai baru tersebut. Sumber daya manusia tidak hanya harus dilengkapi dengan keterampilan saja untuk mencapai tujuan ekonomi tetapi juga keterampilan untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan untuk itu dibutuhkan integrasi ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dapat mengelola kepentingan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan (Azis 2010).

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dan politik. Beberapa indikator yang menjadi syarat pembangun berkelanjutan, Djajadiningrat (dalam Rozikin, 2012) menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis mengacu pada pemeliharaan tatanan lingkungan hidup di bumi agar dapat terus terjaga kelestariannya. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan yaitu; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui: pencegahan pencemaran lingkungan, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem dan sumberdaya alam yang rusak, meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem alam dan binaan manusia.

2. Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut di atas dapat dicapai melalui kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

3. Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada *human right*, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi dibidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu memperhatikan proses demokrasi yang transparan dan bertanggungjawab, kepastian kesedian pangan, air, dan pemukiman.

4. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

Keberlanjutan pertahanan dan keamanan yaitu bagaimana cara menghadapi dan mengatasi ancaman dari luar maupun dalam yang dapat membahayakan identitas, integritas negara dan bangsa. Adapun prinsip dasar dari pembangunan berkelanjutan meliputi, antara lain:

Pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Kedua, menghargai keaneragaman (*diversity*). Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara memanfaatkan dan merusak. Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.

Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang, oleh karena itu persepsi semacam itu perlu diubah.

5. Keberlanjutan Sosial Budaya

Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu:

- a) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- b) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. kelas sosial yang dihilangkan dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
- c) Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Konsep dasar pembangunan berkelanjutan menurut Djonet dalam (Simarmata et al. 2021) pembangunan yang menyelaraskan antara tujuan ekonomi, sosial lingkungan dan pemerintahan atau institusi yang baik. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan, diartikan sebagai upaya standar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai kegiatan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini dengan tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Dengan demikian diharapkan bahwa tidak saja mampu dalam melaksanakan pengelolaan

pembangunan yang ditugaskan (*to do thing right*), tetapi juga dituntut untuk mampu mengelolanya dengan suatu lingkup yang lebih menyeluruh (*to do the right thing*).

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs, dari 17 tujuan TPB/SDGs terdapat satu tujuan target dan beberapa indikator yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan program sanitasi total berbasis masyarakat dalam penerapan program ODF di Kabupaten Pringsewu yang akan peneliti fokuskan untuk diteliti yaitu :

1. Tujuan 6: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang

Indikator :

- a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
- b) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasitotal berbasis masyarakat (STBM)
- c) Jumlah desa/kelurahan yang open defecation Free ODF stop buang air besar sembarangan (SBS)
- d) Jumlah kabupaten kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Kawasan dan komunal
- e) Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat.
- f) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT).

2.4 Tinjauan Tentang Inovasi Organisasi

Menurut Sutarno (dalam Hutagalung dan Hermawan 2018) menjelaskan bahwa inovasi sebagai cara-cara baru dalam mengatur kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk

proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berfikir secara mandiri untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa berinovasi termaksud untuk organisasi perusahaan rumah sakit, universitas dan organisasi pemerintahan.

Pentingnya nilai pengetahuan dan pembelajaran dalam inovasi organisasi sangat penting. Kajian inovasi selama ini menunjukkan bahwa proses inovasi juga tidak sesederhana seperti menerjemahkannya dengan membawa kebaruan saja, namun justru lebih kompleks dari hal tersebut karena melibatkan banyak aspek terutama di sektor publik. Menurut Mulgan Ec Albury (dalam Muluk, 2008) menunjukkan bahwa "*Successful innovation is the creation and implementation of new process, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality.*" Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Apa yang ditunjukkan oleh Mulgan Ec Albury tersebut membuktikan bahwa inovasi telah berkembang jauh dari pemahaman awal yang hanya mencakup inovasi dalam hal produk (*productst end services*) dan proses semata.

Inovasi produk atau layanan berasal dari perubahan bentuk dan desain produk atau layanan sementara inovasi proses berasal Inovasi berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Perkembangan baru yang mencakup inovasi dalam hal metode pelayanan ternyata juga masih berkembang lagi menjadi inovasi strategi atau kebijakan (Baker dalam Muluk, 2008)

Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan. Inovasi dalam strategi atau kebiiaan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. Jenis lain yang kini juga berkembang adalah inovasi dalam interaksi system yang mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*). Dengan

demikian adanya inovasi yang diciptakan pemerintah tidak hanya membawa pembaharuan saja tetapi juga membawa keharusan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pelayanan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam upaya pembangunan.

2.5 Tinjauan Tentang Kolaborasi

Beberapa dekade terakhir pendekatan “*collaborative governance*” telah dikembangkan sebagai strategi baru dalam pengelolaan pemerintahan. Pendekatan ini menyatukan berbagai pemangku kepentingan, baik dari lembaga-lembaga publik, sektor swasta maupun masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang di dasarkan pada konsesus. Pendekatan ini menyatukan berbagai aktor penting dalam pengambilan keputusan. Aktor-aktor tersebut diharapkan dapat menutupi keterbatasan atau melengkapi peran yang sudah di lakukan pemerintah.

Menurut sudarmo yang dikutip oleh (Waliah et al. 2022) *collaborative governance* merupakan cara mengelola, menata dan memanage suatu urusan dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam suatu jaringan atau kelompok. Baik antar institusi pemerintah maupun non pemerintah. *collaborative governance* dapat diterapkan dalam penyelesaian berbagai masalah dengan berbagai institusi baik pemerintah maupun non pemerintah, baik secara vertikal maupun horizontal yang begitu kompleks. sedangkan menurut Ansell and Gash yang di kutip oleh (Waliah et al. 2022) mendefinisikan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan melibatkan stakeholder dari lembaga non negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang normal, berorientasi consensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.

Upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat, jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendirian. Konsep *collaborative governance*

biasanya mengacu pada sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks atau situasi *multifaceted problems*, kemudian dalam pengaturan kelembagaan, menempatkan kolaborasi berada ditengah-tengah antara pemerintah dan warga negara, sehingga semiliki sebutan yang berbeda-beda antar lain *new publik governance*, *network governance*, perencanaan kolaboratif, kolaborasi lintas sektor dan *collaborative publik management*.

Kemitraan melibatkan bentuk kerjasama yang lebih dari sekedar kontrak kerjasama. Kerjasama yang dijelaskan dalam konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta adalah kerja sama masing-masing pihak yang memiliki keprihatinan di luar apa yang tertulis dalam kontrak. Kemitraan antara pemerintah dengan swasta berbeda dengan kerjasama lainnya, seperti kontrak kerja, swastanisasi dan outsourcing. Tipe kerjasama seperti itu lebih merupakan kerjasama antar pemerintah dan swasta untuk menyelesaikan masalah dari satu pihak bukan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dari kedua pihak.

Kemitraan dilakukan oleh pemerintah dengan institusi diluar pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa arena kemitraan, yaitu: (1) kolaborasi antara institusi pemerintah (*internal*), (2) kolaborasi antara institusi pemerintah dan institusi bisnis, dan (3) kemitraan antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil. Kolaborasi antara institusi pemerintah (*internal*) dalam pelaksanaan penyelesaian masalah, pemerintah memiliki departemen-departemen yang fokus terhadap satu sektor, tetapi adapula instansi pemerintah yang menangani pelayanan publik secara bersama-sama (lintas sektor) dikarenakan perlunya keterlibatan antar instansi.

Kolaborasi antar lembaga pemerintah dan lembaga bisnis, banyak literatur mengatakan bahwa kemitraan antara lembaga pemerintah dan bisnis pertama kali dikembangkan sebelum kemitraan antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat. lembaga bisnis sering dianggap, memiliki tradisi dan nilai efisiensi dan inovasi yang lebih baik daripada lembaga pemerintah. "*Positive Image*" yang

dimiliki oleh bisnis sering disebut sebagai pertimbangan pemerintah untuk berkolaborasi dengan istitusi bisnis. Selain menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tanggap pemerintah kemitran antara keduanya sering merupakan symbol politik untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap upaya peningkatan efisiensi pemberian pelayanan publik. Melalui kemitraan ini diharapkan akan menjadi pembelajaran secara positif oleh warga.

Disektor publik, inovasi kolaboratif sering disamakan dengan jaringan pemerintah dimana pemberian layanan publik dapat dilakukan melalui interaksi banyak pihak dan pemerintah berindak sebagai mediator dan manajer dalam jaringan. Artinya pemerintah tidak lagi menjadi pemain utama dalam pelaksanaan pelayanan publik, tetapi perlu bersinegri dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pelayanan publik, dengan kata lain untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dalam pengaturan organisasi yang kompleks, perlu suatu pendekatan baru. Pendekatan ini harus bekerja untuk memenuhi peran besar ekstra-organisasi aktor, peran administrator baru sebagai jaringan fasilitator dan tetap memberikan kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek.

Tata kelola kolaboratif juga dibangun atas gagasan bahwa warga negara berhak memberikan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan segenap warga masyarakat dalam proses kebijakan publik tentunya akan membawa dampak positif, tidak hanya bagi pelaksana kebijakan tetapi juga akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

2.5.1 Kolaborasi Dalam Persepektif Teori Organisasi

Dalam literatur administrasi publik sering digunakan terminology governance untuk menjelaskan keterkaitan antara organisasi. Pengertian governance tidak sekedar pelibatan lembaga publik dalam formulasi untuk implementasi kebijakan. Tetapi terhubungnya derbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik. Pada hakikatnya jika tujuan organisasi sulit atau tidak mungkin dicapai secara individua tau mandiri (independent), maka dibutuhkan sebuah kolaborasi antarorganisasi, dia

atau tiga organisasi yang memiliki persamaan tujuan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini terkandung dua hal penting; pertama karena organisasi adalah berdiri sendiri (*independent*). Kedua, karena adanya kebutuhan akan pencapaian tujuan antara organisasi yang satu dengan yang lain terfokus pada tujuan atau objek yang sama, maka organisasi melakukan kerjasama antarorganisasi (Raharja yang dikutip oleh Islamy H 2018).

2.5.2 Model Kolaborasi

Dalam berbagai literatur kolaborasi berangkat dari berbagai macam kajian keilmuan antaranya dari teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan maupun kajian ilmu lainnya. Basis teori ini mempengaruhi sudut pandang dan penekanan kolaborasi dalam merumuskan komponen utama didalamnya. Kata model merupakan gambaran realitas yang disederhanakan kemudian dijadikan dalam derajat dan struktur yang dapat digunakan sebagai aplikasi teori kedalam dunia nyata (Astuti et al. 2020).

Berikut ini beberapa model prinsip kolaborasi yang dijadikan referensi utama dalam kajian ilmiah:

1. Vigoda

Memahami proses kolaborasi dapat dilihat melalui enam tahapan yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum kolaborasi yang akan dilakukan, tahapan tersebut antara lain:

1) Memutuskan isu

Memutuskan isu didalam kolaborasi dilakukan untuk membuktikan kolaborasi tersebut baik atau buruk bagi anggotanya. Membuktikan melalui dua kondisi, jika:

- a. masalah diusahakan menjadi sebuah investasi bersama dengan membuat sebuah kerja bersama sama dan;

b. terdapat alasan yang tepat serta jelas agar dapat di percaya. Pemangku kepentingan yang akan hadir akan memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar dan kelompok.

2) Menentukan karakter masalah

Menentukan karakter masalah dapat dimulai dengan sebuah pertanyaan “apa dan dimana” masalah tersebut. Kolaborasi membutuhkan kejelasan apa yang menjadi isu dan dimana dibutuhkan tindakan. Setiap anggota adalah individu yang memiliki kompetensi untuk bernegosiasi terhadap masalah dan mampu saling bertukar gagasan untuk bekerja sama demi menghasilkan kolaborasi yang efektif dan efisien.

3) Mencari tau siapa saja yang tertibat

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi memiliki tujuan yang sama untuk saling meningkatkan komitmen, kepercayaan dan keyakinan dalam perencanaan tujuan bersama. Dengan demikian proses menjalankan kolaborasi akan lebih efektif.

4) Mencari tahu bagaimana mengimplementasikannya

Terwujudnya kolaborasi yang efektif dapat dipengaruhi oleh kedewaan berkomunikasi, kolaborasi, ketulusan, keikhlasan dan fleksibilitas. Perlu dipahami pula bahwa kolaborasi adalah sebuah perjalanan yang harus dilalui sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan.

5) Mencari tahu bagaimana penyelenggaraannya

Untuk menenggarakan program atau kegiatan dengan baik, setidaknya terdapat hal yang perlu dilakukan diantaranya:

- a. Para pemangku kepentingan sepakat secara bersama-sama melakukan program tersebut dengan metode yang sudah ditentukan bersama;
- b. Memikirkan kembali dan mendefinisikan tujuan; dan
- c. Mementukan indikator-indikator kerja untuk seluruh proses dalam berkolaborasi.

6) Mencari tahu bagaimana mengevaluasi prosesnya

Melalui evaluasi akan terlihat dampak dari upaya yang telah dilakukan dari proses kolaborasi, seperti

- a. Menilai dampak dan perubahan bagi organisasi tersebut;
- b. Bagi anggota-anggota organisasi

2. Weber, Lovrich, Dan Graffney

Edward P. Weber, Nicholas P. Lovrich, dan Michael Graffney mengemukakan kolaborasi dapat berhasil bila menekankan pada integrasi pada fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi. Integrasi ini meliputi fungsi birokrasi, lintas area kebijakan level pemerintah dan warga ikut terlibat. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah terlibat dalam pemecahan masalah dan implementasinya. Terdapat 3 (tiga) dimensi yang dikemukakan oleh (Weber et al. 2005):

1) Dimensi kapasitas vertikal

Dimensi kapasitas vertikal melibatkan hubungan hirarkis antara badan-badan pemerintah dalam system federal serta antara badan-badan, warga negara dan organisasi non pemerintah. Dengan demikian, dimensi vertikal berokus pada kewenangan hukum yang diberikan kepada kepada manajer publik oleh pejabat yang dipilih secara demokratis dan tujuan dari program resmi pemerintah yang dilaksanakan oleh para manager. Penilaian kapasitas menjadi masalah pengukuran tingkat kepatuhan yang terikat dengan hukum dan peraturan yang dikelola oleh lembaga pemerintah. artinya hubungan yang dilakukan pada dimensi kapasitas vertikal merupakan hubungan relasi atas bawah.

Ukuran lain dari kapasitas vertikal melibatkan dukungan terhadap hukum yang bersangkutan diantara masyarakat yang menjadi sasaran penegakan. Ukuran penegakan hukum tidak sama dengan peryarakatan hukum, namun tetap memberikan ukuran legitimasi dari sudut pandang warga yang terkena dampak hukum dan kemungkinan besar akan mempengaruhi kapasitas program vertikal dimasa depan untuk masalah terkait.

Sebagai contoh, jika sebuah lembaga memperoleh tingkat kepatuhan hukum yang tinggi (kapasitas vertikal yang tinggi) tetapi mengasingkan masyarakat dalam prosesnya sehingga sejumlah besar warga negara akhirnya menentang hukum yang bersangkutan, ada resiko bahwa upaya kepatuhan dimasa depan akan menghadapi perlawanan tambahan dan tingkat kepatuhan sukarela yang lebih rendah, dan akan menimbulkan biaya agensi yang lebih besar (misal, biaya legitimasi, kurangnya ketersediaan untuk berbagi informasi) untuk mendapatkan tingkat kepatuhan yang sama. Hal ini kemudian akan mewakili kasus berkurangnya kapasitas vertikal jangka panjang.

2) Dimensi kapasitas horizontal

Dimensi kedua dari kerangka kerja kapasitas berasal dari kesadaran bahwa penyelesaian masalah yang efektif untuk masalah-masalah berbasis wilayah memaksa pemerintah untuk saling ketergantungan dengan pihak-pihak lain yang bantuannya sangat diperlukan dalam pengelolaan masalah. Oleh karena itu, kapasitas pemecahan masalah jangka panjang menuntut intraksi yang berkelanjutan dengan mitra yang diberdayakan dan berbasis lokal-dimensi horizontal. Mitra horizontal adalah komunitas-komunitas yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dan penyelesaian masalah publik. Masalah yang dipermsalahkan oleh suatu lembaga 'vertikal' dan wilayah geografis tertentu. Mitra yang diberdayakan memiliki kapasitas pemecahan masalah yang tinggi dan meunjukkan komitmen masyarakat terhadap pengambilan keputusan yang luas dan inklusif, dibandingkan dengan proses pengambilan keputusan hanya melibatkan beberapa segmen masyarakat. hubungan antara kapasitas masyarakat 'horizon' dan kapasitas pemecahan masalah kolaboratif yang berhasil.

Modal sosial merupakan ini dari kapasitas pemecahan masalah masyarakat. sebuah komunitas yang memiliki jaringan hubungan kolaborasi horizontal yang dibangun atas dasar kepercayaan akan meningkatkan kapasitasnya untuk menjalankan pemerintahan yang efektif. Elemen modal sosial melibatkan kepercayaan dan kejujuran, kepercayaan telah diidentifikasi sebagai elemen

penting untuk membangun atau mempertahankan modal sosial, Putnam dalam (Weber et al. 2005), sebagai sumberdaya yang dapat mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi pemecahan masalah secara kolektif dalam suatu organisasi atau komunitas, Fukuyama dan Ostrom dalam (Weber et al. 2005) serta berbagai hal yang esensial untuk memperhatikan secara luas perhatian pihak-pihak tertentu yang berda di luar batas-batas transaksi yang spesifik dan dapat diukur Agranoff dan MC Guire yang dikutip oleh (Weber et al. 2005)

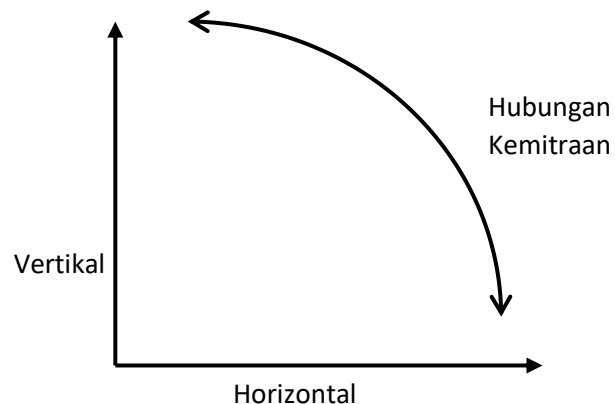
Kejujuran adalah bagian penting dari perekat yang menyatukan dan mendorong kapasitas aksi kolektif modal sosial karena salah mengartikan posisi untuk mendapatkan keuntungan adalah perilaku beresiko tinggi, terutama dikomunitas kecil. Keuntungan apa pun yang diperoleh kemungkinan besar hanya bersifat jangka pendek, mengingat kemampuan orang lain untuk memeriksa kredibilitas cerita dan menjatuhkan sanksi yang bersifat sosial (misalnya, mengurangi kerjasama, mengurangi bisnis) jika ternyata tidak benar Weber dikutip oleh (Weber et al. 2005).

3) Dimensi kemitraan vertikal-horizontal

Kapasitas pemecahan masalah jangka Panjang yang tinggi tentu saja juga melibatkan kemitraan yang dinamis-dimensi vertikal-horizontal yang mencangkup hubungan antara lembaga-lembaga federal, negara bagian dan local, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut dengan warga negara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mewakili sektor sukarela dan sektor swasta, Kettl dalam (Weber et al. 2005). Kemitraan yang hidup berarti bahwa kepercayaan, tujuan bersama, dan saling ketergantungan telah berkembang sedemikianrupa sehingga para mitra bersedia untuk bekerja bersama sama saat ini, dalam waktu dekat dandalam jangka Panjang, hal ini juga berarti bahwa masyarakat dan lembaga yang terlibat dalam kemitraanyang dinamis lebih mampu mengkatalisasi dan memanfaatkan sumber daya di luar komunitas dan organisasi mereka untuk tujuan pemecahan masalah.

Indikator dari kapasitas kemitraan vertikal-horizontal adalah tingkat kepercayaan yang ada antara warga negara masyarakat dan menjabat pemerintah yang terlibat dalam kemitraan. Sejauh tingkat kepercayaan yang tinggi, kemitraan kolaboratif kemungkinan akan lebih berkelanjutan sepanjang waktu dan lebih efektif dalam pemecahan masalah, mengingat adanya ketersediaan yang lebih besar untuk berbagi informasi yang dimiliki secara pribadi, berkurangnya sikap untuk mendapatkan keuntungan strategis dengan mengorbankan orang lain, biaya pemantauan yang lebih rendah, dan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penegakan hukum secara mandiri, Fukuyama; Weber dalam (Weber et al. 2005).

Gambar 2.1
Model Kolaborasi Weber, Lovrich, dan Garaffaney



Sumber: (Astuti et al. 2020)

2.5.3 Prinsip - Prinsip Kolaborasi

Sedangkan dalam Good Governance, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007:35) prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance antara lain :

1. Transparansi, pihak yang melakukan kerja sama dan telah bersepakat untuk melakukan kolaborasi harus transparan dalam memberikan berbagai data dan

informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, tanpa ditutup-tutupi.

2. Akuntabilitas, pihak yang melakukan kerja sama yang telah bersepakat untuk melakukan kerja sama harus bersedia untuk mempertanggung jawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerja sama.
3. Partisipatif, pihak yang melakukan kerja sama harus menjalankan prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.
4. Efisiensi, digunakan untuk menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sedikit tetapi dapat mencapai hasil yang lebih maksimal.
5. Efektifitas, pelaksanaan kerja sama harus menggunakan nilai efektivitas yaitu selalu mengukur keberhasilan dengan membandingkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil yang nyata yang diperoleh. Konsesus, kemudian kerja sama tersebut harus dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dapat menyetujui suatu keputusan bersama.
6. Saling menguntungkan dan memajukan, dalam pelaksanaannya, kerja sama harus memegang prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme dalam kerja sama. Dalam melakukan kerja sama, maka diperlukannya prinsip-prinsip untuk melaksanakan kerja sama. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membuat kerja sama bisa berjalan dengan baik dari proses sampai akhir.

Demikian halnya pendapat dari Siegler dikutip oleh (Waliah et al. 2022) mengatakan bahwa terdapat 8 prinsip utama dalam menerapkan tatakelola kolaboratif diantaranya:

- 1) Produksi barang publik harus melibatkan masyarakat;
- 2) Masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan asset untuk memecahkan masalah publik;

- 3) Para profesional perlu berbagi keahlian mereka untuk memperkuat komunitas mereka
- 4) Politik membutuhkan musyawarah publik
- 5) Harus ada kemitraan politik kooperatif yang bercirikan kontinuitas;
- 6) Politik harus strategis
- 7) Politik harus berubah kegunaan sebuah lembaga untuk memperkuat dan memecahkan masalah publik
- 8) Politik harus akuntabel.

Kolaborasi dalam pemerintahan (*governance*) menurut De Seve yang dikutip oleh (Mutiarawati dan Sudarmo 2021) terdapat 8 (delapan) indikator yang biasa menilai ukuran keberhasilan kolaborasi yang diterapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. *Network Structured* (struktur jaringan)

Indikator ini memuat keterikatan dan hubungan jaringan yang terbangun. Menjelaskan tentang deskripsi kontekstual suatu keterikatan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Milward dan Provan yang dikutip oleh (Mutiarawati and Sudarmo 2021) mengategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk:

- a. *Self Governance* model ini tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing *stakeholders* berpartisipasi dalam *network* dan manajemen dilakukan oleh semua anggota. Kelebihan dari model ini bahwa semua *stakeholders* ikut berpartisipasi aktif, memiliki komitmen serta mudah membentuk jaringan. Kelemahan model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus. *Stakeholders* yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan komunikasi dan pantauan secara intensif.
- b. *Lead Organization* model ini memiliki entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia

pelayanan. Sifatnya lebih tersentralisir. Kelebihannya bisa efisien dan arah jaringan jelas. Kelemahannya, terdapat dominasi dari *lead organization* dan kurangnya komitmen dari anggota yang tergabung. Anggota dalam *network* sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hierarki struktur jaringan harus bersifat organis dan sedater mungkin, semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban tanggungjawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama (Jones yang dikutip oleh Mutiarawati and Sudarmo 2021)

- c. *Network administrative organization* (NAO) model ini memiliki entitas administrative secara tegas untuk mengelola jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji.

2. *Commitment to a common Purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Indicator ini menjelaskan alasan yang melatarbelakangi mengapa sebuah jaringan tersebut harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif.

3. *Trust Among The participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta)

Indicator ini memuat setiap actor harus saling percaya antar satu sama lain untuk mencapai keberhasilan kolaborasi dalam kolaborasi. Didasari pada hubungan professional atau social, kani keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan informasi-informasi atau usaha-usaha dari *stakeholders* lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola)

Indicator ini dapat dilihat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi:

- a. *Boundary* dan *exclusivity*, menegaskan siapa yang termaksud anggota dan bukan termaksud anggota dalam jaringan/kolaborasi
- b. *Rules* (aturan-aturan), menegaskan pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka

menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama) dan aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

- c. *Self determination*, yakni kebebasan untuk menentukan bagaimana *network* atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa yang diijinkan untuk menjalankannya
- d. *Network management*, yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas dan pemeliharaan organisasi, kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan finansial yang memadai dan berkesinambungan.

5. *Acces to authority* (akses terhadap kekuasaan)

Indikator ini memuat keberadaan ketetapan prosedur ataupun aturan yang pasti dan dapat diterima secara luas oleh seluruh aktor. Tersediannya standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas.

6. *Distributive accountability responsibility* (pembagian Akuntabilitas dan responsibilitas)

Indikator ini memuat adanya pembagian tanggungjawab yang jelas antar stakeholder untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Maksudnya adanya pembagian *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan.

7. *Information shering* (berbagi informasi)

Indikator ini berisi kemudahan akses informasi kepada seluruh anggota dan keterbatasan akses terhadap yang bukan termaksud anggota, yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* kerahasiaan identitas pribadi seseorang) dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.

8. *Acces to resouces* (akses terhadap sumber daya)

indikator ini memuat ketersediaan sumber daya keuangan, teknis, manusia dan sumberdaya lainnya yang diperlukan guna mencapai tujuan jaringan bersama.

Kolaborasi dalam tatanan implementasi terkadang mengalami keberhasilan, namun tidak sedikit mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kolaborasi (Waliah et al. 2022) yaitu:

- 1) Faktor sturuktur sosial
- 2) Faktor kultural
- 3) Faktor kepentingan pemerintah yang mendominasi
- 4) Faktor kearifan dari para stake holder dalam pembuatan keputusan.
- 5) Faktor institusi
- 6) Faktor politik

2.6 Tinjauan Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait permasalahan sanitasi hygiene dan permasalahan air minum masih sangatlah besar. Berdasarkan data Hasil riset Kesehatan dasar 2010 menunjukkan bahwa penduduk yang melakukan BAB numpang di tetangga sebesar 6,7%, menggunakan jamban tidak sehat 25% dan 17,7% BAB disembarang tempat (DJPL 2012). Tidak hanya itu saja perilaku masyarakat Indonesia tentang perilaku mencuci tangan yang rendah yaitu: sete;ah buang air besar 12%; setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%; sebelum makan 14%; sebelum memberi makan bayi 7% dan sebelum menyiapkan makan sebesar 6%, untuk pengelolaan air munum masyarakat Indonesia masih mengelola air minum setelah direbus 99,20%, akan tetapi terdapat 47,50% kandungan *eschericiacoli* dalam kandungan air munum (DJPL 2012).

Rendahnya angka tersebut berimplikasi keberbagai macam permasalahan pada kesehatan. Diare merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang menjadi penyebab nomor satu kematian pada bayi di Indonesia, yaitu 42% dari angka kematian bayi usia 0-11 bulan. Di Indonesia, sekitar 162 ribu jiwa balita meninggal

setiap tahunnya atau sejumlah 60 balita meninggal setiap harinya. Tingginya angka kasus kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan, tidak berimbas dari jenis penyakit saja tetapi juga rendahnya peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap jamban sehat tergolong membutuhkan perhatian khusus, karena kecepatan peningkatan akses tidak sesuai dengan harapan.

Di tahun 2015 target akses yang ingin dicapai sebesar 55,6% untuk perdesaan, namun akses masyarakat pada jamban keluarga sehat di tahun 2009 hanya sebesar 34% saja. Dari hasil data target akses (tujuan SDG's 6) terdapat kesenjangan sebesar 32% dalam waktu 3 (tiga) tahun yaitu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Untuk mencapai sasaran sanitasi SDG's diperlukan cara untuk meningkatkan pencapaian akses sanitasi baik di perdesaan maupun di perkotaan. Disisi lain dengan anggaran pemerintah yang terbatas maka diperlukannya cara-cara yang efektif dan inovatif agar target sasaran sanitasi dapat berjalan dengan baik dan tercapai.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan tersebut, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah Mengembangkan Dokumen Strategi Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008, yang menjadikan STBM sebagai program nasional dan merupakan salah satu sasaran utama dalam RPJMN tahun 2010-2014.

Sanitas total berbasis masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Sedangkan pilar STBM adalah perilaku higienis dan sanitasi yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat. Pilar STBM ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracuan. Adapun pilar STBM yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Stop buang air besar sembarangan,
kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

2. Cuci tangan pakai sabun,
perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga,
melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumahtangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
4. Pengamanan sampah rumah tangga
Melakukan kegiatan pengelolaan sampah dirumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
5. Pengamanan limbah cair rumah tangga
Melakukan kegiatan pengelolaan limbah cair di rumahtangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi, dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan Kesehatan yang mampu memutuskan mata rantai penularan penyakit.

Strategi ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah dan petugas kesehatan yang berkaitan dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Pada tahun 2014 naungan hukum pelaksanaan STBM diperkuat dengan di keluarkannya PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014 strategi penyelenggara sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lainnya yaitu:

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling creation*);
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (*deman creation*);
3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvent*)

Apa bila salah satu komponen STBM tersebut tidak ada maka proses pencapaian 5 (lima) pilar STBM tidak maksimal. Tiga strategi ini disebut komponen sanitasi total.

Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada pilar pertama STBM yaitu bebas buang air besar sembarangan (ODF).

2.7 Tinjauan Tentang *Open Defecation Free* (ODF)

Perilaku buang air besar sembarangan (BABS/*open defecation*) termaksud salah satu contoh perilaku yang tidak sehat, dimana merupakan tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai ataupun area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar sehingga mengkontaminasi lingkungan air, tanah dan udara. *Open defecation free* (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh apa penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan penyakit. ODF adalah keadaan dimana masyarakat secara keseluruhan tidak lagi buang air besar sembarangan, suatu desa dapat dikatakan sukses melaksanakan ODF apa bila 100% penduduk desa tersebut memiliki akses untuk BAB pada jamban sehat.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di provinsi lampung yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di daerahnya sendiri. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah antara pusat, provinsi dan kabupaten, bahwa sanitasi menjadi urusan pemerintah kabupaten (lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Bidang Kesehatan).

Dijelaskan bahwa dalam penerapan STBM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tetapi juga hingga ke daerah dimana pemerintah kabupaten diberikan wewenang untuk mengurus daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut sanitasi tentu sangat mendukung dengan dikeluarkannya PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dimana mengatur tentang permasalahan sanitasi.

Untuk mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengeluarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pringsewu, dimana berisi tentang strategi yang digunakan dalam upaya percepatan universal dengan cara merubah pola pikir yaitu dari program menjadi sebuah gerakan. Sehingga di tahun 2017 dikeluarkan Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/378/KPTS/D.02/2017 tentang Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu *Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017* yang berisi gerakan atau suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama dan berkoordinasi yang berkesinambungan untuk mencapai target Kabupaten Pringsewu yang bebas dari buang air besar sembarangan/stop buang air besar sembarangan pada tahun 2017. Sekaligus dibentuknya tim satuan tugas pelaksana gebrak *open defecation free/stop buang air besar sembarangan* Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 (Peraturan Bupati Pringsewu Nomor: B/443/KPTS/D.02/2017).

Ditahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pringsewu berhasil dalam melakukan pencapaian terhadap sanitasinya yaitu pilar satu STBM dan menjadi kabupaten pertama yang sukses dalam melakukan *open defecation fee (ODF)* atau stop buang air besar sembarangan. Dan di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pringsewu Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan.

2.8 Kerangka Pemikiran

Tingginya angka kasus penyakit berbasis lingkungan yang diakibatkan oleh permasalahan sanitasi serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki jamban dan sanitasi sendiri menjadi salah satu permasalahan yang sangat mengawatirkan sampai saat ini, sehingga pemerintah mengembangkan dokumen Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dikeluarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 825/MENKES/SK/IX/2008 yang menjadikan program STBM sebagai pedoman program nasional yang menargetkan tidak akan ada lagi masyarakat indonesia yang

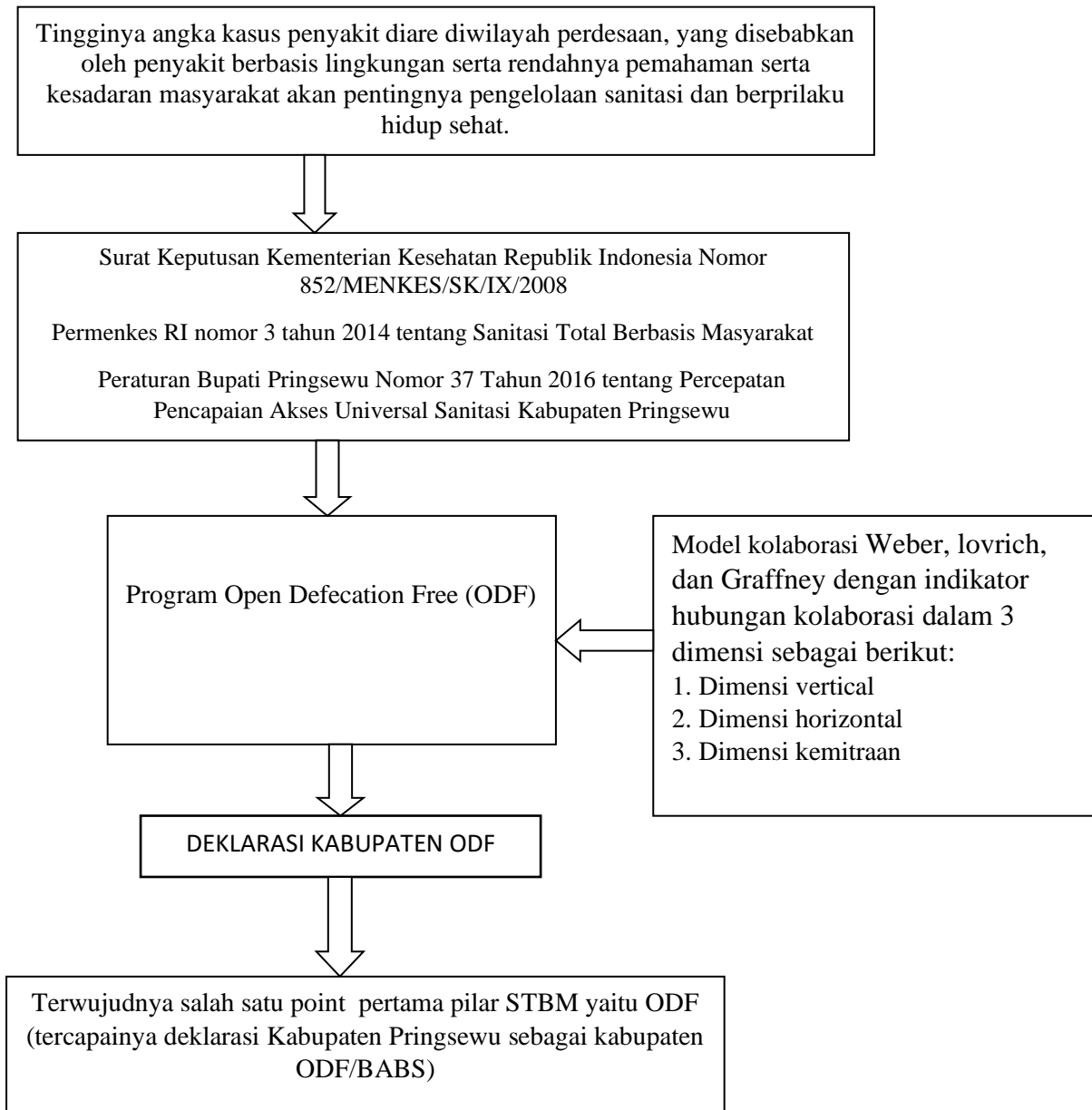
melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS) yang merupakan sasaran utama dalam RPJMN Tahun 2010-2014.

Selanjutnya di tahun 2014 pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan Permenkes RI nomor 3 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat agar pemerintah kabupaten dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dan dapat mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masing-masing. Merespon hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menyusun RPJMD tahun 2015-2019 yang berisikan aspek pada pelayanan umum menjadi poin sarana dan akses terhadap sanitasi dasar. Kemudian untuk mendukung program kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga mengeluarkan Peraturan Bupati Pringsewu No.37/2016 tentang percepatan pencapaian akses *universal* sanitasi di Kabupaten Pringsewu yaitu berisi tentang strategi yang digunakan dalam upaya percepatan universal dengan cara merubah pola pikir yaitu dari program menjadi gerakan, sehingga keluarlah kebijakan tentang Gerakan Bersama Rakyat Kabupaten Pringsewu ODF atau Gebrak ODF.

Untuk menyukseskan program pencapaian akses *universal* tersebut Pemerintah Kabupaten Pringsewu membentuk satgas Gerak ODF yang di dalamnya terdiri atas organisasi perangkat daerah yang juga tergabung dalam kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini dimaksudkan untuk merangkul masyarakat serta membantu menyukseskan program sanitasi total berbasis masyarakat yaitu pilar pertama ODF (*open defecation free*) atau stop BABS. Lingkungan dinyatakan ODF apabila: 1) semua anggota masyarakat telah menggunakan jamban sehat sebagai sarana BAB dan memuang tinja/kotoran bayi kejamban sehat, 2) tidak terlihat tinja manusia disekitar lingkungan, 3) adanya peraturan setempat yang mengatur pemanfaatan jamban sehat, dan 4) adanya mekanisme monitoring oleh masyarakat dalam rangka stop BABS.

Suksesnya suatu program tentu tidak hanya dilakukan oleh perseorang saja melainkan dilakukan secara bersama dalam bentuk kolaborasi, untuk mengetahui Kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Pringsewu dalam implementasinya mengacu pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor B/378/KTPS/D.02/2017 tentang Gerakan

Bersama rakyat Kabupaten Pringsewu *Open defecation free/stop* buang air besar sembarangan tahun 2017 untuk mengukur keberhasilan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Pringsewu, peneliti menggunakan capaian realisasi program, Perubahan perilaku kelompok sasaran, penentu pencapaian program keberlanjutan program. hasil yang diharapkan dari keberhasilan kolaborasi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten lain untuk mencapai hasil yang maksimal dan dapat mendeklarasikan ODF di daerahnya.



Gambar 2.2: Bagan Kerangka Berfikir

Sumber: diolah oleh peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, memiliki langkah-langkah sistematis. Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek/objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Metodologi Penelitian terdapat beberapa pokok yang akan dibahas yaitu Pendekatan dan Tipe Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sebuah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, yaitu dengan data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Menurut (Moleong 2016) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku persepsi, motivasi dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Artinya metode kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data data yaitu berasal dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, atau penelaah dokumen. Metode kualitatif adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan metode observasi partisipasi, untuk

menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara mendalam dengan mengumpulkan data secara lengkap. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, analisis, dokumentasi yang disusun di lokasi penelitian dimana bentuknya tidak berupa angka, akan tetapi penyajiannya dalam bentuk uraian narasi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif adalah metode pengelolaan data dengan cara mengamati dan menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data serta lebih mendalam terhadap objek penelitian.

Oleh karena itu pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan kejadian suatu fenomena yang terjadi di lapangan, serta data yang didapatkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari hasil pengamatan, mengkaji dan menganalisis Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program *Open Defecation Free* (ODF) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) di Kabupaten Pringsewu. Sehingga melalui pendekatan tersebut peneliti mendapatkan hasil yang sesuai terkait dengan fenomena yang ada, dapat ditelaah dengan menggunakan teori yang sudah ada serta bisa mendapatkan hasil yang komprehensif.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dari batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut (Moleong 2016) ada dua maksud peneliti capai untuk merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus, yaitu pertama dengan penetapan fokus dapat membatasi studi, sedangkan kedua yaitu penetapan fokus yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exclusion criteria*) sesuatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Penetapan focus dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan batasan dalam mengumpulkan data oleh peneliti. Focus penelitian memiliki peran penting dalam memandu dan memberikan arahan alannya penelitian sehingga informasi yang ditemukan dilapangan dapat dipilah-pilih sesuai dengan konteks permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini memfokuskan antara lain:

1. Tiga dimensi model kolaborasi dalam kolaborasi menurut Weber, Iovrich, dan Graffney yaitu:
 - a. Dimensi vertikal pada point ini peneliti akan menggambarkan bagaimana relasi antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan NJO SNV dan Masyarakat Kabupaten Pringsewu dalam hubungan atas bawah
 - b. Dimensi horizontal pada point ini peneliti juga akan menggambarkan hubungan antar OPD (organisasi perangkat daerah) dalam melaksanakan penerapan program ODF di Kabupaten Pringsewu
 - c. Dimensi kemitraan point ini peneliti akan menggambarkan bagaimana penggabungan antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam penerapan program ODF di Kabupaten Pringsewu.
2. Pembangunan berkelanjutan program STBM maupun program ODF di Kabupaten Pringsewu, menilai sejauhmana keberhasilan penerapan program ODF terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) pada indikator Tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah yang akan peneliti pilih sebagai tempat penelitian dilakukan. Peneliti dalam melakukan penelitian memilih lokasi yang telah melakukan penerapan program *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop

buang air besar sembarangan di Kabupaten Pringsewu yaitu berlokasi di Dinas Kesehatan sebagai penganggung jawab program ODF dalam pelaksanaan kebijakan STBM. Alasan yang peneliti mengambil wilayah Kabupaten Pringsewu, seperti yang dipaparkan di latar belakang bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten pertama yang berhasil dalam penerapan stop buang air besar sembarangan atau ODF dalam waktu lima (5) tahun, pada hal di tahun 2014 Kabupaten Pringsewu dinilai sebagai daerah yang buruk dalam pengelolaan sanitasinya dibuktikan dengan banyaknya masyarakat Pringsewu yang membuang tinja sembarangan sebab masih minimnya masyarakat yang memiliki jamban sendiri.

Setelah penerapan program ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki jamban, tidak hanya itu saja salah satu desa yang berada di Kabupaten Pringsewu lebih tepatnya desa Pujiharjo di kenal sebagai penghasil cetak jamban sehingga menjadi pendapatan desa. Kabupaten Pringsewu juga menjadi tempat rujukan studi banding oleh daerah lain yang ingin belajar mengenai penerapan program ODF di daerahnya.

3.4 Informan Penelitian

Berdasarkan dari focus dan lokus penelitian, informan penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria pada informan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1) Pelaku atau pelaksana Kolaborasi lintas sektor dalam program STBM pilar 1 *Open defecation free* (ODF)
- 2) Bersedia memeberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti
- 3) Sehat secara mental dan tidak memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan peneliti.

Proses penggalan informasi dan data diperoleh melalui informan penelitian menggunakan Teknik snowball berikut data informan yang dibutuhkan :

Tabel 3.1 data informan

No	Informan	Keterangan
----	----------	------------

1	- Erawaty Komariah, SKM, M. kes Jabatan: Sub Koordinator Subtansi kesling kerjor dinas Kesehatan Kab. Pringsewu - Rieseva Firitria, SKM Jabatan: pengawas Kesehatan kerja, Kesehatan olahraga dan Perlindungan dinas Kesehatan Kab. Pringsewu - Dita Permata Sari, amd. Kes	Informasi mengenai gambaran Kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan Program ODF di Kabupaten Pringsewu
2	- Hari Wahyudhi, S.Ars Jabatan: Analisi Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Pringsewu	Informasi terkait pembangunan IPAL komunal di Kabupaten Pringsewu
3	Tim puskesmas - Tri Priyo Wismanto, A.Md.KL Jabatan: Sanitarian Puskesmas Pagelaran - Maulida Damayanti, A.Md.KL Jabatan: Sanitarian Puskesmas Pagelaran	Informasi terkait pekasanaan program <i>Open Defecation Free</i> (ODF) dari pihak tim kecamatan
4	Paguyuban jamban sewu - Sardi Jabatan: sekretaris paguyuban jamban sewu	Informasi mengenai pelaksanaan program <i>Open Defecation Free</i> (ODF) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu dari pihak paguyuban jamban sewu
5	Aparat pekon - Alkhusari Jabatan: Kaur Kestra Pekon Sukaratu - Legiyanto Jabatan: Kaur Umum Pekon Pujiharjo	Informasi mengenai gambaran pendampingan dalam penerapan Program <i>Open Defecation Free</i> (ODF) di desa sebagai tim pekon
5	Masyarakat pekon Pujiharjo dan pekon sukaratu sebagai salah satu desa yang menerapkan Program STBM pilar 1 ODF	Informasi mengenai dampak yang dirasakan masyarakat terkait adanya program <i>Open Defecation Free</i> (ODF)

Data diolah peneliti 2021

3.5 Jenis dan sumber data

Menurut (Sugiyono 2018) bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memebrikan data kepada pengumpul data, sedangkan

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain ataupun dokumen. Dalam penelitian ini data yang digunakan dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu:

1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian. Data primer dapat berupa kata-kata atau Tindakan dari orang-orang yang diamati dan dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman audio atau sejenisnya (Moleong 2016).

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut (Moleong 2016) merupakan data yang didapatkan dari catatan, artikel, buku laporan sebagai teori, dimana ada suatu peluang ketika sebuah data yang hendak diteliti telah tersedia ada dikumpulkan oleh peneliti lain. Jika seseorang akan mengekstrak data tersebut untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah studi, maka yang dilakukan oleh peneliti tersebut adalah mengumpulkan data dari sumber sekunder yang meliputi: a) publikasi Lembaga pemerintah atau non-pemerintah, b) penelitian terdahulu, c) laporan atau catatan pribadi, d) media masa.

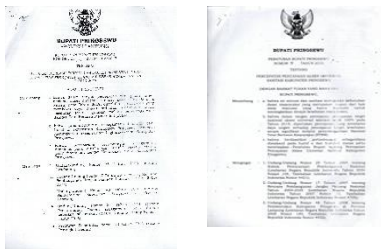
3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Triangulasi

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu Langkah yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian ini ialah mendapatkan data, jika penelitian tidak mengetahui tentang Teknik pengumpulan data maka, peneliti sulit untuk mendapatkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam penelitian. Terdapat empat (4) macam Teknik pengumpulan data secara umum yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data tersebut yaitu terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi (Sugiyono 2018).

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung dilapangan terhadap suatu objek yang menjadi topik penelitian. Observasi juga merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Ada beberapa jenis observasi diantaranya: a) Observasi partisipan yaitu ketika seorang peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan secara aktif yang dijalankan oleh anggota grup yang sedang diamati dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan anggota grup, b) Observasi non-partisipatif yaitu kegiatan ketika seorang peneliti yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan yang dijalankan tetapi sebagai pengamat pasif yang dimana hanya melihat, mengamati, mendengarkan dan mengambil kesimpulan c) Observasi terhadap objek.

Tabel 3.2. Daftar Observasi Yang Berkaitan Dengan Penelitian

No	Objek Observasi	Data Yang Di Proleh
1	situasi dan kondisi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pelaksanaan program ODF - Ketersediaan informasi terkait program ODF - Tahapan pelaksanaan program ODF - Hasil setelah dilaksanakan program ODF
2	 <p>Surat Peraturan Bupati Pringsewu terkait Program <i>Open Defecation Free</i> (ODF)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen peraturan bupati yang digunakan dalam pengesahan penerapan program ODF - dokumen acuan proses pelaksanaan dan pembagian susunan tugas untuk masing-masing organisasi perangkat daerah yang namanya tercantum dalam peraturan bupati program ODF

Sumber : diolah oleh peneliti 2021

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui lebih dalam tentang informasi dari responden. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2018) mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penggunaan instrument dalam wawancara mendalam pada penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis struktur dan tercatat apa yang dikemukakan oleh informan mengenai program ODF dalam pelaksanaan dan untuk mengetahui hasil dari penerapan itu sendiri di masyarakat. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para informan secara tatap muka dengan tujuan lebih mengenal dengan dan mendapatkan informasi secara detail mengenai topik penelitian. Selain itu juga untuk mempermudah dalam proses pengumpulan data wawancara yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan wawancara terstruktur.

Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dengan pasti dan menggali informasi secara detail serta mendalam mengenai topik penelitian. Wawancara terstruktur yang dilakuka yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang sama kepada informan kemudian dicatat ataupun menggunakan alat bantu seperti perekam suara. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data bagi peneliti apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk mennetukan permasalahan yang harus diteliti maka informasi didapatkan harus sedalam-dalamnya dari reponden. Penelitian mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan kolaborasi lintas sektor dalam program STBM pilar 1 program ODF untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pringsewu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi teknik pengumpulan data berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dokumentasi diklarifikasikan kedalam dua jenis yaitu sumber

data resmi dan sumber data tidak resmi. Sumber data resmi ialah dokumen ataupun data-data yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang sah seperti, dokumen surat keputusan, hasil rapat laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Sedangkan data tidak resmi ialah dokumen atau data yang diperoleh melalui individu ataupun dokumen berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup atau lain sebagainya yang diambil peneliti terkait dengan penelitian.

Tabel 3.3. Daftar Dokumentasi Yang Berkaitan Dengan Penelitian

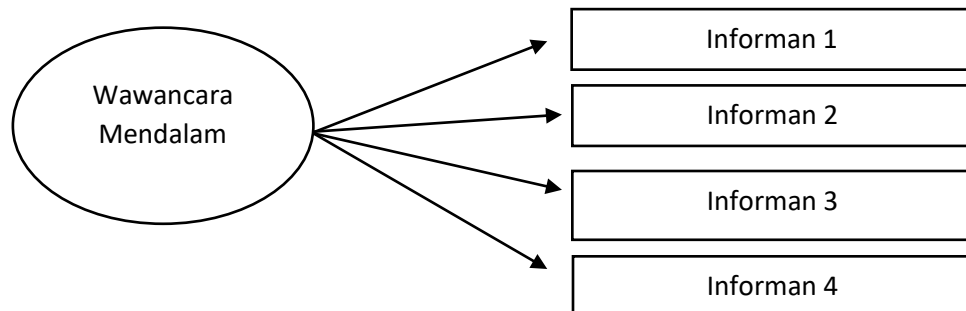
No	Dokumen	Data yang diperoleh
1	Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008	Mendapatkan informasi tentang penerapan strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat.
2	Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Mendapatkan berbagai informasi tentang 4 pilar STBM salah satunya yaitu ODF
3	Peraturan Bupati Pringswu Nomor: 37 Tahun 2016 tentang percepatan pencapaian akses universal sanitasi Kabupaten Pringsewu	Mendapatkan informasi tentang percepatan pencapaian akses universal sanitasi di Kabupaten Pringsewu
4	Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/378/KPTS/D.02/2017 tentang Gerakan Bersama rakyat Kabupaten Pringsewu Open Defecation / stop buang air besar sembarangan	Mengetahui proses pembentukan gerakan bersama rakyat Kabupaten Pringsewu dalam pelaksanaan program <i>Open Defecation Free</i> (buang air besar sembarangan)
5	Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor: B/443/KPTS/D.02/2017 tentang Satuan tugas pelaksanaan gebrak Open Defecation Free/ Stop buang air besar sembarangan Kabupaten Pringsewu tahun 2017	Mengetahui pembagian tugas pokok dan wilayah kerja Satgas Gebrak dalam pelaksanaan program <i>Open Defecation Free</i> (buang air besar sembarangan)
6	Monografi kabupaten/wilayah	Mendapatkan informasi tentang pembagian wilayah dalam mengkoordinir wilayah atau kecamatan dalam penerapan program <i>Open Defecation Free</i> (buang air besar sembarangan)

Sumber: diolah oleh peneliti (2021)

4. Data Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian

ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono 2018). Lebih lanjut Sugiono juga menjelaskan bahwa peneliti menggunakan Observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mendapatkan data secara serempak artinya triangulasi sumber merupakan pengumpulan data dari sumber yang berbeda dengan Teknik yang sama. Adapun penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam.



Sumber : Sugiono (2016:242)

Gambar 3.1 Model Triangulasi Sumber

3.7 Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun, ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2018). Analisis data kualitatif juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya

disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menurut B. Milles dan Huberman dalam (Saleh, 2017). Dalam pandangan model interaktif terdapat tiga komponen kegiatan analisis data yaitu (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan) sedangkan pengumpulan data termaksud dalam proses interaktif.

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, bukan diakhir penelitian. Idealnya dalam proses pengumpulan data sudah dilakukan terlebih dahulu ketika penelitian masih berupa konsep atau draf. Dalam pengumpulan tidak ada waktu spesifik atau khusus yang disediakan untuk proses pengumpulan data karena sepanjang penelitian berlangsung, sepanjang itu juga proses pengumpulan data dapat dilakukan. Tahap pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan yaitu melalui dokumentasi dan wawancara secara mendalam tahapan ini akan berhenti apa bila data yang didapatkan atau diperoleh penelitian telah memadai dan tidak ada data yang dianggap baru.

Sebagai langkah awal dalam proses pembuatan draf sedikit demi sedikit peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dimana peneliti sudah melakukan pre-eliminatory yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal, bahwa fenomena yang diteliti benar ada di Kabupaten Pringsewu.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lapang penelitian dilapangan, maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum, memilih, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

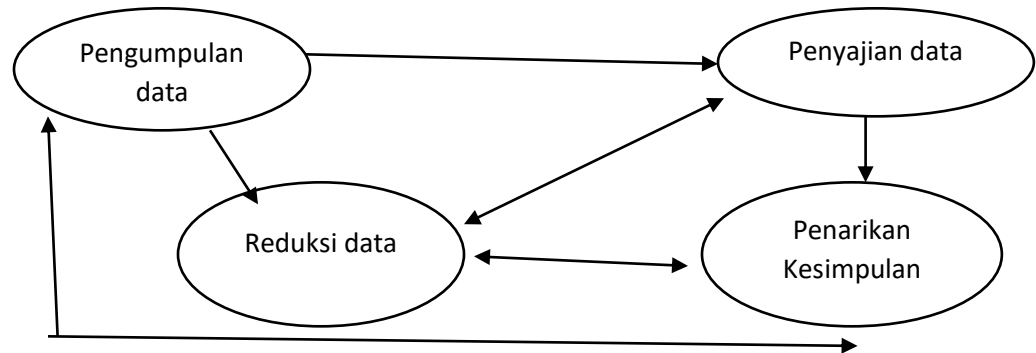
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun sejenisnya, melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap hingga di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Kesimpulan didapatkan dari serangkaian data yang telah disajikan sebelumnya dalam bentuk narasi dikemukakan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada sehingga akhir dapat ditemukan dan dilakukan penarikan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan ini merujuk pada jawaban dari pertanyaan yang diajukan dan mengungkapkan 5W+1H dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini setelah peneliti melakukan penelitian maka dilakukan penyimpulan hasil riset pada pembahasan dimana kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti sudah melalui analisis terlebih dahulu.

Gambar 3.2 komponen dalam analisis data (Interactive Model)



Sumber : Milies dan Huberman dalam Sugiono (2016: 247)

3.8 Teknik keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan rehabilitas, dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data dari hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa kriteria, Menurut (Sugiyono 2018) uji keabsahan data terdiri dari:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif yang dilakukan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ara yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kredibilitas data, adalah:

a. Triangulasi

Menurut (Moleong 2016) menjelaskan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanaatkan sesuatu yang lain untuk pengeekan data dari sumber yang lainnya. Sedangkan menurut Wiliam dalam (Sugiyono, 2018) mengatakan bahwa dalam pengujian kreadibilitas perlu dilakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara maupu waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan data menggunakan teknik wawancara dengan berbagai sumber

diantaranya Pihak Dinas Kesehatan dan satgas gebrak ODF di Kabupaten Pringsewu. Peneliti melakukan triangulasi ini dengan membandingkan data yang di peroleh di lapangan melalui sumber observasi, wawanara dan dokumentasi.

2. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, artikel, catatan lapangan, foto maupun rekaman hasil wawanacarayang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Rekaman wawancara yang peneliti dapatkan digunakan untuk mendukung peneliti dalam mencatat data dan membandingkan data yang dikumpulkan darin informan di lapangan.

a. Pengujian *Trasferability*

Pengujian *trasferability* merupakan validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan yang dapat diterapkan disituasi lain. Kemampuan trasfebilitas dalam memahami hasil penelitian memungkinkan dapat diterapkan ke hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya, agar dapat didipahami oleh pembaca.

b. Pengujian *Depenability*

Pengujian *depenability* atau reliabilitas merupakan pengeekan ulang atau audit keseluruhan dari proses penelitian keseluruhan aktifitas dalam melakukan penelitianyang dilakukan oleh dosen pembimbing dari mulai menentukan masalah/fokus penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data melakukan uji keabsahan data sampai penarikan kesimpulan menunjukkan apakah sesuai atau tidak.

c. Pengujian *Konfermability*

Pengujian *konfermability* disebut juga dengan pengujian objektivitas penelitian yang dimana hasil dari penelitian telah disepakati bersama apakah sudah sesuai dengan data yang ada dan dilakukan pengujian dapat dilakukan secara bersamaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Setelah melakukan penelitian dengan mengacu pada dimensi-dimensi kolaborasi lintas sektor dan indikator pembangunan berkelanjutan disimpulkan bahwa, penerapan program ODF di Kabupaten Pringsewu telah berhasil, namun untuk relasi yang terjalin merupakan bentuk sebuah kerjasama yang dimana, tidak terlepas dari adanya kontribusi yang diberikan baik dari pihak pemerintah, pihak lembaga non pemerintah dan pihak masyarakat yang tergabung dalam lintas sektor.

Sehingga dapat menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai Kabupaten 100% ODF pertama di Provinsi Lampung. Selain itu, hasil kerjasama lintas sektor dalam program, ODF di Kabupaten Pringsewu menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat studi banding dari kabupaten lain untuk mempelajari tentang penerapan program ODF. Untuk masyarakat sendiri manfaat yang dirasakan dari keberhasilan program yaitu meningkatnya tarap kesehatan masyarakat, ditandai dengan berkurangnya kasus berbasis lingkungan serta mendukung pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial semua itu tercermin sebagai pemenuhan indikator sehingga dikatakan telah berhasil dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal*).

Namun, dibalik berhasilnya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melakukan program ODF, untuk status keberlanjutan program sendiri tidak dilakukan secara maksimal sebab ditemukan beberapa kendala, seperti tidak maksimalnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi karena kurangnya tim yang tidak tergabung lagi dalam kerjasama lintas sektor, bergantinya program unggulan yang dijalankan sehingga program sanitasi hanya sebatas berjalan tidak lagi menjadi utama, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat dapat kembali perilaku awal, yaitu buang air besar sembarangan.

- 2) Pemerintah kabupaten Pringsewu harus lebih memperhatikan kembali serta membangun komitmen jangka panjang, dimana dengan adanya komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder dapat mendukung status keberlanjutan program terus berjalan dan tidak hanya berhenti pada penerapan program ODF saja, tetapi terus berlanjut pada seluruh pilar STBM yang lain, sehingga program yang dijalankan tetapi berhasil tanpa mengalami kemunduran. Untuk program STBM yang lain, bisa dijadikan sebagai agenda riset untuk kedepannya, sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberikan bantuan dalam bentuk masukan ataupun inovasi lain agar program yang dilaksanakan bisa lebih maksimal dan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis menyatakan bahwa dalam kolaborasi lintas sektor yang dilakukan dalam penerapan program ODF telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu adanya perhatian yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar pembangunan berkelanjutan di bidang sanitasi melalui program STBM dapat terus berlanjut dan menjadikan masyarakat Kabupaten Pringsewu lebih sehat terhindar dari penyakit berbasis lingkungan. Maka dari itu peneliti mengemukakan beberapa saran untuk perbaikan selanjutnya sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi kembali terkait penerapan program STBM di Kabupaten Pringsewu baik dari pilar 1 sampai dengan pilar 5 agar

kontribusi masyarakat dapat meningkat sebagai kelompok sasaran program itu sendiri. Serta diperlukannya komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder yang tergabung di awal program ODF untuk melanjutkan program STBM yang lain.

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus lebih memperhatikan kembali Keberlanjutan program STBM tidak hanya untuk program ODF saja tetapi untuk program yang lain juga sekaligus mendorong terwujudnya SDGs di kabupaten pringsewu pada tujuan 6 air dan sanitasi, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa tidak adanya sosialisasi terkait program STBM dapat memicu kembalinya masyarakat pringsewu ke perilaku buang air besar sembarangan dan timbulnya permasalahan sanitasi yang lainnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Robby. 2019. "Analisis Peran Pemerintah Pekon Dalam Melaksanakan Pilar Pertama Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kabupaten Pringsewu Studi Di Pekon Wonodadi Dan Pekon Kediri Kecamatan Gadingrejo)." Lampung.
- Apriani, Betillia Dwi. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Belum Open Defecation Free (Odf) Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020."
- Astuti, Retno et al. 2020. "Sampul Collaborative Governance." *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik* 161.
- Azis, Iwan Jaya. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran Dan Kontribusi Emil Salim*. Cetakan Pe. edited by I. J. Azis. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. 2012. "Pedoman Pelaksanaan Teknis STBM." *Kesehatan* 1–72.
- Elsi, Elsa. 2012. "Hubungan Penyakit Menular Berbasis Lingkungan Dengan Status Gizi Balita." 35(2):146–55.
- Erlangga, Aji Bagus Satya. 2018. "Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Pelajar Di Kota Batu (Studi Pada BNN Kota Batu Dan Dinas Pendidikan Kota Batu)." *Journal Brawijaya Knowledge Garden*.
- Fahrana, Zelki. 2021. "Realisasi Program Kerja Koprasi Unit Desa (KUD) Bumi Asih Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Roka Hulu." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fauzan Ahmad Siregar, and Lailatul Usriyah. 2021. "Peranan Komunikasi Orga Dalam Manajemen Konflik." *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 5(2):163–74. doi: 10.47766/idarrah.v5i2.147.
- Hardianto, Muhammad Reza, and Isnaini Rodiyah. 2016. "Peran Pemerintah Dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan." *4(2):117–34. doi: 10.21070/jkmp.v4i2.689.*

- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, and Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. cetakan pe. edited by D. Novidiantoko and E. R. Fadilah. Yogyakarta: Deepublish.
- Islami, Mahardika Era. 2020. “Keberlanjutan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Pekanbaru.” *JOM Fisip Unri* 7(1):1–15.
- Islamy H, La Ode Syaiful. 2018. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. cetakan pe. edited by D. Noviantoko. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahawati, E. et al. 2021. *Penyakit Berbasis Lingkungan*. cetakan 1. edited by R. Watrianthos. Yayasan Kita Menulis.
- Makmur, and Rohana Thahier. 2016. *Konseptual & Kontekstual Administrasi Dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. cetakan ke. edited by D. Sumayyah et al. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. 2017. “Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Dan Manajemen Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Bagi Semua Target Nasional Terkait Air Dan Sanitasi.” 1–8.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Jurnal Media Administrasi* 6(1):1–17. doi: 10.56444/jma.v7i1.67.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Mubarak, M. Husni Al. 2022. “Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Bidang Kesehatan Pencegahan Stunting Di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.”
- Muluk, Khairul. 2008. “Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah.” 44–45.
- Mutiarawati, Tika, and Sudarmo. 2021. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan.” *Jurnal Wacana Publik* 1(2):82–98.
- Palupi, Tyas Ajeng Martha. 2019. “Pola Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dan Non- Government Organization (Ngo) (Studi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dan Sticing Nederlandse Vrijwiligers (SNV) Neder Development Organisation Dalam Implementasi Program ODF Unt.... Lampung.
- Rini, Endah Setiyo. 2021. “Bentuk Kerjasama Dalam Jaringan Industri Kecil (Studi Tentang Kerjasama Industri Kecil Genteng Di Desa Sumberingin Kulon Ngunut Kabupaten Tulungagung) Bab II Pustaka.” Universitas Muhammadiyah Malang.

- Rompis, Inggrid K. et al. 2022. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Upaya Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kapoya Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* VIII(116):55–62.
- Rozikin, M. 2012. "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Batu." *Jurnal Review Politik* 02(02):219–43.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *ANALISIS DATA KUALITATIF*. Cetakan Pe. edited by U. Hamzah. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Santoso, Djonet. 2019. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. cetakan pe. edited by A. Mafttuchan. DKI. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saputra, Repi et al. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Ke 1." *Dohara Publisher Open Access Journal (DPOAJ)* 01(02):35–43.
- Simarmata, Dewi Syintia et al. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 3(3):343–59. doi: 10.23960/administrativa.v3i3.104.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Suparmoko, Muhammad. 2020. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9(1):39–50.
- Sutisari, Sadhana et al. 2013. "Kerja Sama Antar Sektor Dalam Program Pertanian Padi Organik Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)." *J. Administrasi Publik* 1(4):128–34.
- Triana, Anisa Putri, and Emenda Sembiring. 2019. "Evaluasi Kinerja Dan Keberlanjutan Program Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3R." *Jurnal Teknik Lingkungan* 25(1):15–28. doi: 10.5614/j.tl.2019.25.1.2.
- Wahyudin, Dian et al. 2021. "Interorganizational Coordination On Car Free Day Low Carbon Transportation." *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 120(2):120–29.
- Wahyutesya, Arief Sambada. 2020. "Dukungan Sosial Menuju Desa Open Defecation Free (ODF) Di Desa Sukobono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso." *Digital Repository Universitas Jember*.
- Waliah, S. et al. 2022. *Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik)*. edited by A. Hendrayadi. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Weber, Edward P. et al. 2005. "Collaboration, Enforcement, and Endangered Species: A Framework for Assessing Collaborative Problem-Solving Capacity." *Society and Natural Resources* 18(8):677–98. doi: 10.1080/08941920591005034.
- Wibowo, Pipid Ari et al. 2022. "Socialization About Open Defecation Free (Odf) in Wates Village , Panekan District , Magetan." *Jurnal Abdi Masyarakat* 3(1):124–29.
- Wicaksono, Moh. Sony. 2016. "Pelaksanaan Rencana Pembangunan Berkelanjutan (Studi Pada Kampung Iggris Pare Kabupaten Kediri)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 2(1):58–67.
- Yulitiawati, Y., and R. Rusmidarti. 2021. "Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU." *Jetap* 91–109.
- peraturan kementerian kesehatan Republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat
- peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Percepatan Akses Universal Sanitasi Kabupaten Pringsewu
- peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan
- peraturan Bupati Pringsewu Nomor: B/378/KTSP/D.02/2017 tentang Gerakan Rakyat Kabupaten Pringsewu Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar Sembarangan Tahun 2017
- surat Keputusan Bupati Pringsewu nomor: B/433/KTSP/D.02/2017 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Gebrak *Open Defecation Free/Stop Buang Air Besar Sembarangan* Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah